

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja satuan pemerintah daerah ( Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan satuan kerja pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Seiring dengan kedudukannya yang cukup strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, proses penyusunan Renja Tahun 2018 melibatkan tahapan dan proses awal yang cukup detail, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pertama-tama dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, evaluasi capaian Renstra, sampai pada pengkajian terhadap kondisi terkini yang dihadapi. Langkah ini ditempuh guna mendapatkan gambaran secara jelas capaian target serta kondisi terkini sebagai informasi penting untuk perumusan program/kegiatan berikutnya.

Secara umum, proses penyusunan Renja 2018 terbagi dalam dua tahap yang saling berurutan :

1. Pertama, tahap perumusan rancangan Renja, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan mendasar dalam rangka mempersiapkan bahan yang dibutuhkan untuk penyajian dokumen Renja, seperti kegiatan pengelolaan data, analisa gambaran OPD, review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, telaah terhadap rancangan

awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, serta perumusan kegiatan prioritas.

2. Kedua, adalah tahap penyajian dokumen Renja yakni penyusunan rancangan Renja OPD berdasarkan seluruh informasi dan bukti yang telah dikumpulkan pada tahap pertama. Selanjutnya dibahas bersama TAPD dalam menetapkan pagu indikatif hingga menjadi Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018.

Sementara itu, terdapat prinsip-prinsip didalam penyusunan Renja yang tidak terlepas dalam tahapan proses penyusunan Renja yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

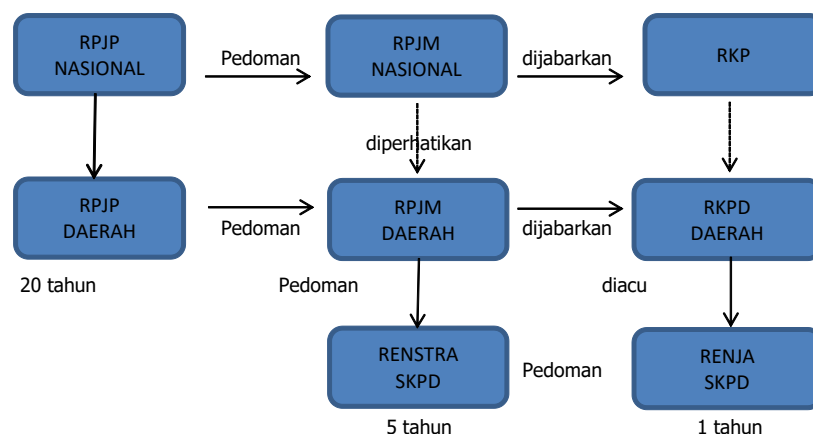
1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
2. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Renja OPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan OPD terhadap Renstra SKPD; evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Penyusunan program dan kegiatan OPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD.
6. Program/kegiatan dalam RKPD provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD kabupaten/kota dirinci

menurut sumber dana APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, APBN dan sumber lainnya.

7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun  $n$  dan tahun  $n+1$ .

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 juga berpedoman pada Visi Misi Presiden RI sebagaimana dinyatakan dalam 9 (sembilan) agenda prioritas Nawa Cita, RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Bagan alur penyusunan Renja OPD adalah sebagai berikut :



Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan, bahwa penyusunan Renja OPD tidak terlepas dari RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra K/L dan Renstra OPD dan RKPD Daerah. Berpedoman pada dokumen menurut alur perencanaan tersebut, maka

Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 disusun hingga menjadi sebuah dokumen yang akan menjadi acuan untuk 1 (satu) tahun kedepan.

Penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 mengacu pada Renstra Tahun 2016-2021, yang merupakan tahun ke- 3 (tiga) pelaksanaan Renstra.

RKPD memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun dan menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan Renja Dinas Koperasi, UKM Tahun 2018 dengan RKPD Propinsi Sumatera Barat adalah termuat dalam BAB V Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam tabel matrik rencana program kegiatan Dinas Koperasi, UMKM yang memuat perkiraan maju rencana tahun 2018 yang terdiri dari target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif.

Dalam rangka pengembangan Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM telah mengalokasikan program-program kegiatan pada tahun 2018, sebagai berikut :

- a) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
- b) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- c) program peningkatan kehidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro
- d) program peningkatan daya saing UMKM
- e) program penguatan kelembagaan koperasi

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI di Sumatera Barat adalah program peningkatan daya saing UMKM dan program penguatan kelembagaan koperasi. Sehingga untuk Renja Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2018 juga mengacu kepada program –program yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Visi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat adalah **“TERWUJUDNYA KOPERASI DAN UMKM YANG BERDAYA SAING**

**SEBAGAI BASIS PEREKONOMIAN DAERAH UNTUK MENGHADAPI PASAR GLOBAL".** Sedangkan misi adalah :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi
2. Meningkatkan kinerja dan daya saing koperasi serta usaha simpan pinjam dan UMKM dalam mengelola potensi ekonomi
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Dinas Koperasi, UMKM

Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Dinas Koperasi, UMKM Propinsi Sumatera Barat menyusun Rencana Kerja Tahun 2018. Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) SKPD yang kemudian ditindaklanjuti dalam penyusunan RAPBD.

## **1.2. Landasan Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 11) Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
- 12) Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri No. 0008/M.PPN/01/2007/050/264 A/SJ Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Musrenbang.
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.
- 14) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015
- 16) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat
- 17) Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-904-2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-784-2012 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Bertitik tolak dari hal- hal yang telah disebutkan, maka maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD Dinas Koperasi, UMKM adalah :

#### **1.3.1 Maksud Penyusunan Renja**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat untuk satu tahun mendatang. Secara rinci maksud dari penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Koperasi dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

### **1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan Fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manjerial dalam manajemen perencanaan efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat.

Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat serta indikator

kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program satu tahun kedepan

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja 2018 Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I. Pendahuluan**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra K/L, Renstra OPD.

##### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

##### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

#### **BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun lalu.**

##### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas**

Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2016, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat.

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan. Pada bagian ini dijelaskan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap

perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5. Review atas usulan Kabupaten/Kota

Berisikan tentang usulan program kegiatan yang mengakomodir kebutuhan Kabupaten/Kota

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang diakitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

**BAB IV. Penutup**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan maupun ketersediaan anggaran.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2016 dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor-faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai.

##### 2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

Pada tahun anggaran 2016 alokasi APBD yang dikelola Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 19.566.373.125,- dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Tidak Langsung Rp. 7.096.471.603,-
- Belanja Langsung Rp. 12.469.901.522,-

Dari anggaran yang tersebut diatas, dapat kami jabarkan realisasi fisik dan keuangan dari program /kegiatan adalah :

No.	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN INI (Rp.)	REALISASI		
			FISIK (%)	KEUANGAN	
				(Rp.)	(%)
1	3	5	7	8	9
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>12.469.901.522</b>	<b>93,83</b>	<b>10.662.394.388</b>	<b>85,51</b>
A	<b>BELANJA LANGSUNG POKOK</b>	<b>4.136.120.997</b>	<b>84,90</b>	<b>3.185.061.174</b>	<b>77,01</b>
I	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.831.725.997</b>	<b>96,93</b>	<b>1.605.914.448</b>	<b>87,67</b>
1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	20.000.000	100,00	19.718.020	98,59
2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	244.392.000	100,00	211.906.772	86,71
3	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	214.837.590	100,00	195.648.800	91,07
4	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	90.006.967	100,00	89.707.100	99,67
5	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	50.000.000	100,00	49.865.500	99,73

No.	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI	
		TAHUN INI (Rp.)	FISIK (%)	KEUANGAN	
				(Rp.)	(%)
6	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	35.000.000	100,00	34.767.000	99,33
7	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	281.550.000	80,00	177.755.000	63,13
8	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.000.000	100,00	13.903.400	92,69
9	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	40.000.000	100,00	39.875.000	99,69
10	KONSULTASI KE DALAM DAERAH DAN KE LUAR DAERAH	386.720.000	100,00	367.849.900	95,12
11	PENYEDIAAN JASA SOPIR KANTOR	109.846.815	100,00	87.953.972	80,07
12	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	256.972.625	100,00	234.763.984	91,36
13	PENYEDIAAN JASA INFORMASI, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI	72.400.000	100,00	67.500.000	93,23
14	PENYEDIAAN JASA PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR	15.000.000	100,00	14.700.000	98,00
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>1.663.850.000</b>	<b>65,86</b>	<b>981.901.626</b>	<b>59,01</b>
1	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	400.000.000	5,00	-	-
2	PENGADAAN MEUBELEUR	198.000.000	5,00	-	-
3	PENGADAAN KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI	286.300.000	100,00	283.465.520	99,01
4	PENGADAAN PERALATAN STUDIO, KOMUNIKASI DAN INFORMASI	303.550.000	100,00	236.500.000	77,91
5	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN STUDIO, KOMUNIKASI DAN INFORMASI	15.000.000	100,00	14.915.000	99,43
6	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	190.000.000	100,00	185.126.000	97,43
7	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	90.000.000	100,00	84.256.106	93,62
8	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.000.000	100,00	19.755.000	98,78
9	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEUBELEUR	16.000.000	100,00	15.400.000	96,25
10	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI	30.000.000	100,00	29.805.000	99,35
11	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI DAN JARINGAN	80.000.000	100,00	77.682.500	97,10
12	PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASSET SKPD	35.000.000	100,00	34.996.500	99,99
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>45.360.000</b>	<b>100,00</b>	<b>44.688.000</b>	<b>98,52</b>
1	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA	45.360.000	100,00	44.688.000	98,52

No.	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN INI (Rp.)	REALISASI		
			FISIK (%)	KEUANGAN	
				(Rp.)	(%)
IV	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>61.464.000</b>	<b>100,00</b>	<b>47.726.000</b>	<b>77,65</b>
1	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	61.464.000	100,00	47.726.000	77,65
V	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN</b>	<b>533.721.000</b>	<b>100,00</b>	<b>504.831.100</b>	<b>94,59</b>
1	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	37.260.000	100,00	34.533.000	92,68
2	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	156.491.000	100,00	138.566.100	88,55
3	MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD	83.970.000	100,00	80.141.500	95,44
4	PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD	216.000.000	100,00	213.040.000	98,63
5	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN DATA DAN INFORMASI	40.000.000	100,00	38.550.500	96,38
B	<b>BELANJA LANGSUNG URUSAN</b>	<b>8.333.780.525</b>	<b>98,26</b>	<b>7.477.333.214</b>	<b>89,72</b>
VI	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING KOPERASI</b>	<b>3.559.881.625</b>	<b>97,37</b>	<b>3.067.004.669</b>	<b>86,15</b>
1	PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI/KOPERASI AWARD	128.954.000	100,00	113.333.100	87,89
2	PEMBENAHAN KOPERASI TIDAK AKTIF	77.215.000	100,00	69.083.800	89,47
3	PEMASYARAKATAN PERKOPERASIAN BAGI PEMANGKU KEPENTINGAN DAN	233.174.000	90,00	199.688.378	85,64
4	REVITALISASI KELEMBAGAAN KOPERASI	227.360.000	95,00	175.917.600	77,37
5	PEMBUBARAN KOPERASI PRIMER DAN SEKUNDER PROVINSI YANG TIDAK AKTIF	31.178.000	90,00	20.308.000	65,14
6	PENILAIAN DAN USULAN PENGHARGAAN BAGI TOKOH KOPERASI	224.629.000	100,00	187.045.300	83,27
7	SOSIALISASI PERKOPERASIAN DI LOKASI TMMD/N	41.000.000	100,00	32.283.000	78,74
8	PELATIHAN TEKNIK PENGHITUNGAN PAJAK BAGI KOPERASI	120.563.000	100,00	117.823.000	97,73
9	PELATIHAN PENILAIAN KESEHATAN SIMPAN PINJAM BAGI PEMBINA	135.557.000	100,00	96.106.700	70,90
10	PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBINA TENTANG KOPERASI	135.777.000	100,00	96.443.000	71,03
11	PELATIHAN AKUNTANSI BAGI PENGURUS / PENGELOLA KOPERASI	377.785.000	100,00	342.370.000	90,63
12	SINKRONISASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN DAN UMKM	44.122.000	100,00	38.670.500	87,64

No.	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN INI (Rp.)	REALISASI		
			FISIK (%)	KEUANGAN	
				(Rp.)	(%)
13	PEMBINAAN PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI SEKTOR PERTANIAN/PERIKANAN	58.914.000	5,00	-	-
14	PEMODALAN DAN USAHA KOPERASI SEKTOR PERTANIAN DENGAN INSTANSI	66.225.000	100,00	59.657.200	90,08
15	REVITALISASI USAHA KOPERASI	85.354.000	100,00	76.592.841	89,74
16	PENINGKATAN USAHA RITAIL KOPERASI	102.420.000	100,00	93.867.100	91,65
17	PASAR (KOPPAS) DAN PENGELOLA PASAR RAKYAT	60.000.000	100,00	26.055.000	43,43
18	PENINGKATAN PERAN KOPERASI SEKTOR ANEKA USAHA	102.820.000	100,00	100.250.000	97,50
19	PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH DENGAN PENDEKATAN DENGAN	138.710.000	100,00	124.307.250	89,62
20	GERAKAN MASYARAKAT SADAR KOPERASI (GEMASKOP)	586.208.100	100,00	558.378.750	95,25
21	PENINGKATAN DAN EVALUASI PEMODALAN KOPERASI	103.748.525	100,00	97.342.300	93,83
22	PENYULUHAN PERKOPERASIAN BAGI KELOMPOK USAHA PRODUKTIF	100.000.000	100,00	98.200.750	98,20
23	PENINGKATAN PERAN USAHA SIMPAN PINJAM POLA SYARIAH	104.604.000	100,00	86.040.700	82,25
24	PEMBINAAN PELAKSANAAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI POLA KONVENSIONAL	62.008.000	100,00	61.195.700	98,69
25	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA SIMPAN PINJAM	211.556.000	100,00	196.044.700	92,67
VII	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING UMKM</b>	<b>4.773.898.900</b>	<b>98,93</b>	<b>4.410.328.545</b>	<b>92,38</b>
1	SOSIALISASI DAN KOORDINASI PENDAFTARAM MERK DAN SERTIFIKAT	143.615.000	100,00	140.936.500	98,13
2	PELATIHAN TEKNIK PENYUSUNAN PROPOSAL BAGI PELAKU UMKM	135.497.000	100,00	130.132.900	96,04
3	PARTISIPASI PROMOSI PRODUK UMKM	642.521.000	100,00	563.154.700	87,65
4	TEMU MITRA UMKM	102.245.200	50,00	44.960.800	43,97
5	PENGEMBANGAN UMKM PENGRAJIN	263.722.700	100,00	204.675.645	77,61
6	PERKUATAN PRODUK UMKM	99.990.000	100,00	99.770.000	99,78
7	PEMBINAAN DAN PEGEMBANGAN KELEMBAGAAN DI LOKASI SENTRA	99.755.000	100,00	97.805.000	98,05
8	PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN UMKM KE PERBANKAN DAN LEMBAGA NON	197.954.000	100,00	193.197.600	97,60
9	BIMTEK PENINGKATAN PEMASARAN PRODUK UMKM	88.599.000	100,00	86.704.000	97,86
10	PELATIHAN TEKNIS PENGEMBANGAN USAHA BAGI UMK WIRUSAHA PEMULA (DAK)	316.737.600	100,00	298.891.800	94,37

No.	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN INI (Rp.)	REALISASI		
			FISIK (%)	KEUANGAN	
				(Rp.)	(%)
11	PELATIHAN TEKNIS PENGEMBANGAN USAHA BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL KAWASAN	422.316.800	100,00	394.711.800	93,46
12	BAGI UMK PESERTA MAGANG SIRUSAHA (DAK)	316.737.600	100,00	285.871.600	90,26
13	PELATIHAN TEKNIS PENGEMBANGAN USAHA BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL BIDAN	105.579.200	100,00	100.667.200	95,35
14	PELATIHAN STRATEGI PEMASARAN BAGI UMK (DAK)	232.274.400	100,00	220.812.000	95,07
15	PELATIHAN STRATEGI PEMBIAYAAN BAGI UMK (DAK)	211.158.400	100,00	195.150.800	92,42
16	PELATIHAN ADMINISTRASI KEUANGAN BAGI UMK WIRUSAHA PEMULA (DAK)	211.158.400	100,00	195.517.400	92,59
17	PELATIHAN ADMINISTRASI KEUANGAN BAGI UMK PESERTA MAGANG WIRUSAHA (DAK)	211.158.400	100,00	197.951.900	93,75
18	BAGI UMK PENGELOLAAN MAKANAN BERBASIS UMBI-UMBIAN (DAK)	105.579.200	100,00	100.667.700	95,35
19	PEMBINAAN TENAGA PENDAMPING (DAK)	867.300.000	100,00	858.749.200	99,01

### 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa ada beberapa program tidak memenuhi target kinerja, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi sebesar 96,93%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi sebesar 65,86%
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi dengan realisasi sebesar 97,37%
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM dengan realisasi sebesar 98,93%

### 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Berdasarkan tabel realisasi program/kegiatan tahun 2015 tersebut diatas terlihat bahwa ada beberapa program/kegiatan yang telah memenuhi target yang telah direncanakan, yaitu 1) program peningkatan disiplin aparatur; 2) program terpadu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; 3) program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan..

**3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Pada tahun 2016, realisasi program/kegiatan tidak ada yang melebihi target. Semua kegiatan terealisasi sesuai dengan yang telah ditargetkan.

**4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Realisasi**

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target dari program tersebut diatas adalah:

- a. Efisiensi atas beberapa belanja seperti belanja listrik dan faximile, pengadaan peralatan studio, komunikasi dan informasi, biaya perjalanan dinas, efisiensi atas pelaksanaan rapat.
- b. adanya penundaan DAU dari pemerintah pusat sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan seperti pengadaan kendaraan dinas, pengadaan mobiler, pembinaan peningkatan daya saing koperasi sektor pertanian/perikanan.

**5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD**

Implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat

**6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut**

Untuk Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

- a. Melakukan review/telaahan ulang terhadap target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas.
- b. Merencanakan target fisik dan keuangan maksimal sebanyak pada tahun sebelumnya.

Rangkuman tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja disajikan sebagaimana dalam Tabel T.VI.C.5 dibawah ini.

**TABEL T.VI.C.5**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN SRENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI SUMATERA BARAT**

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2016	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA			TARGET	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN TAHUN 2016		Catt
					TARGET PROGRAM/KEGIATAN SKPD TAHUN 2016	REALISASI	TINGKAT REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	REALISASI REKENJA SKPD TAHUN 2017	TARGET CAPAIAN CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
<b>1.15.1.15.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>									
1.15.1.15.01.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bln	100%	12 bln	100%	100%	12 bln	100%	100%	
1.15.1.15.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan listrik	12 bln	100%	12 bln	100%	100%	12 bln	100%	100%	
1.15.1.15.01.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	12 bln	100%	12 bln	100%	100%	12 bln	100%	100%	
1.15.1.15.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	12 bln	100%	12 bln	100%	100%	12 bln	100%	100%	
1.15.1.15.01.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Tersedianya barang cetakan dan peggandaan adm perkantoran	12 bln	100%	12 bln	100%	100%	12 bln	100%	100%	
1.15.1.15.01.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Tersedianya komponen instalasi listrik	12 bln	100%	12 bln	100%	100%	12 bln	100%	100%	

# RENJA 2018

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	REALISASI TARGET	TARGET DAN REALISASI KINERJA			TARGET	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN TAHUN 2016		Catt
					PROGRAM/KEGIATAN SKPD TAHUN 2016	KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	PROGRAM/KEGIATAN SKPD TAHUN 2016		PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI	
TARGET	REALISASI	TINGKAT	KEGIATAN	REALISASI			TARGET				
REKENING	DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA SKPD TAHUN 2016	KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	PROGRAM/KEGIATAN SKPD TAHUN 2016	REALISASI	TINGKAT	KEGIATAN	REALISASI	TARGET	
							REALISASI (%)	RENJA SKPD TAHUN 2017	CAPAIAN	CAPAIAN	
1.15.1.15.01.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	33 unit AC 1PK, 4 unit AC 2 PK, 3 unit mesin tik, 2 unit mesin penghancur kertas, 14 unit filing kabinet, 2 unit genset, 1 unit pompa, 2 unit tanki air, 2 unit kulkas, 2 unit rak piring	80%	33 unit AC 1PK, 4 unit AC 2 PK, 3 unit mesin tik, 2 unit mesin penghancur kertas, 14 unit filing kabinet, 2 unit genset, 1 unit pompa, 2 unit tanki air, 2 unit kulkas, 2 unit rak piring	80%	80%	33 unit AC 1PK, 4 unit AC 2 PK, 3 unit mesin tik, 2 unit mesin penghancur kertas, 14 unit filing kabinet, 2 unit genset, 1 unit pompa, 2 unit tanki air, 2 unit kulkas, 2 unit rak piring	80%	80%	
1.15.1.15.01.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 bln	100%	12 bln	100%	100%	12 bln	100%	100%	
1.15.1.15.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minuman	2000 kotak	100%	2000 kotak	100%	100%	2000 kotak	100%	100%	
1.15.1.15.01.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi	12 bln	90%	12 bln	90%	90%	12 bln	90%	90%	
1.15.1.15.01.01.22.	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Tersedianya Jasa Sopir Kantor	12 bln	100%	12 bln	100%	100%	12 bln	100%	100%	
1.15.1.15.01.01.24.	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	Tersedianya Jasa Pengaman Kantor	12 bln	100%	12 bln	100%	100%	12 bln	100%	100%	
1.15.1.15.01.01.25.	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Tersedia jasa informasi, dok. Dan publikasi	12 bln	100%	12 bln	100%	100%	12 bln	100%	100%	
1.15.1.15.01.01.26.	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Tersedianya mental dan fisik aparatur	12 bln		12 bln			12 bln			
<b>1.15.1.15.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>									
1.15.1.15.01.02.05	Pengadaan peralatan gedung kantor		1 set verticalblind, 30 set westafel kamar mandi	100%	1 set verticalblind, 30 set westafel kamar mandi	100%	100%	1 set verticalblind, 30 set westafel kamar mandi	100%	100%	
1.15.1.15.01.02.10.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan operasional kantor	1 unit	5%	1 unit	5%	5%	1 unit	5%	5%	
1.15.1.15.01.02.15.	Pengadaan Meubelir	Tersedianya meubelir Kantor	1 set meja workstation ( 6 meja), 3 set workstation ( 3 meja), 12 unit meja makan, 15 unit kursi kerja, 70 unit kursi makan, 60 set	5%	1 set meja workstation ( 6 meja), 3 set workstation ( 3 meja), 12 unit meja makan, 15 unit kursi kerja, 70 unit kursi makan, 60 set	5%	5%	1 set meja workstation ( 6 meja), 3 set workstation ( 3 meja), 12 unit meja makan, 15 unit kursi kerja, 70 unit kursi makan, 60 set	5%	5%	

## RENJA 2018

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	REALISASI TARGET	TARGET DAN REALISASI KINERJA			TARGET	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN TAHUN 2016		
REKENING	DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA SKPD TAHUN 2016	KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	PROGRAM/KEGIATAN SKPD TAHUN 2016			PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI	TARGET	Catt
					TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)	REKORD SKPD TAHUN 2017	REALISASI	TARGET	
1.15.1.15.01.02.19.	Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	Tersedianyan Alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	Kamera 1 unit, TV 2 unit, LCD Proyektor 3 unit, sound sistem 1 set, warless 2 unit, 1 unit mic conference, 2 unit faximile	40%	Kamera 1 unit, TV 2 unit, LCD Proyektor 3 unit, sound sistem 1 set, warless 2 unit, 1 unit mic conference, 2 unit faximile	40%	40%	Kamera 1 unit, TV 2 unit, LCD Proyektor 3 unit, sound sistem 1 set, warless 2 unit, 1 unit mic conference, 2 unit faximile	40%	40%	
1.15.1.15.01.02.21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat komunikasi, Alat informasi	Terpeliharanya alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	faximile 2 unit, televisi 3 unit, warless 2 unit, mic conference 1 unit, speaker 5 unit, tape recorder 2 unit, ampliplayer 2 unit, kamera 2 unit	100%	faximile 2 unit, televisi 3 unit, warless 2 unit, mic conference 1 unit, speaker 5 unit, tape recorder 2 unit, ampliplayer 2 unit, kamera 2 unit	100%	100%	faximile 2 unit, televisi 3 unit, warless 2 unit, mic conference 1 unit, speaker 5 unit, tape recorder 2 unit, ampliplayer 2 unit, kamera 2 unit	100%	100%	
1.15.1.15.01.02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung	1 Gedung Dinas, 1 Gedung UPTD Balatkop	100%	1 Gedung Dinas, 1 Gedung UPTD Balatkop	100%	100%	1 Gedung Dinas, 1 Gedung UPTD Balatkop	100%	100%	
1.15.1.15.01.02.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional	mobil 3 unit, motor 10 unit	100%	mobil 3 unit, motor 10 unit	100%	100%	mobil 3 unit, motor 10 unit	100%	100%	

## RENJA 2018

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	REALISASI TARGET	TARGET DAN REALISASI KINERJA			TARGET	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN TAHUN 2016		
REKENING	DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA SKPD TAHUN 2016	KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	PROGRAM/KEGIATAN SKPD TAHUN 2016			PROGRAM/ KEGIATAN	REALISASI	TARGET	Catt
					TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI	REKENING SKPD TAHUN 2017	REALISASI	TARGET	
							(%)		CAPAIAN	CAPAIAN	
1.15.1.15.01.02.26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya perlatan dan perlengkapan	AC 21 unit, Genset 4 unit, mesin tik 15 unit, mesin absen 2 unit, pompa air 5 unit, kipas angin 13 unit.	100%	AC 21 unit, Genset 4 unit, mesin tik 15 unit, mesin absen 2 unit, pompa air 5 unit, kipas angin 13 unit.	100%	100%	AC 21 unit, Genset 4 unit, mesin tik 15 unit, mesin absen 2 unit, pompa air 5 unit, kipas angin 13 unit.	100%	100%	
1.15.1.15.01.02.27.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur	Terpeliharanya meubeler	kursi staf 15 unit, meja staf 10 unit, meja eselon 8 unit, lemari kayu 8 unit, lemari besi 8 unit, filiiing kabinet 8 unit, meja rapat 15 unit, kursi rapat 33 unit, rak arsip 1 unit, sofa 1 unit	100%	kursi staf 15 unit, meja staf 10 unit, meja eselon 8 unit, lemari kayu 8 unit, lemari besi 8 unit, filiiing kabinet 8 unit, meja rapat 15 unit, kursi rapat 33 unit, rak arsip 1 unit, sofa 1 unit	100%	100%	kursi staf 15 unit, meja staf 10 unit, meja eselon 8 unit, lemari kayu 8 unit, lemari besi 8 unit, filiiing kabinet 8 unit, meja rapat 15 unit, kursi rapat 33 unit, rak arsip 1 unit, sofa 1 unit	100%	100%	
1.15.1.15.01.02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terpeliharanya Komputer dan jaringan	komputer 18 unit, laptop 15 unit, printer 18 unit, UPS 15 unit, jaringan LAN 1 set	100%	komputer 18 unit, laptop 15 unit, printer 18 unit, UPS 15 unit, jaringan LAN 1 set	100%	100%	komputer 18 unit, laptop 15 unit, printer 18 unit, UPS 15 unit, jaringan LAN 1 set	100%	100%	
1.15.1.15.01.02.29.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Terpeliharanya instalasi dan jaringan	2 gedung	100%	2 gedung	100%	100%	2 gedung	100%	100%	

## RENJA 2018

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2016	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENJA SKPD TAHUN 2017	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN TAHUN 2016		Catt
					TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI	TARGET	
1.15.1.15.01.02.30	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terkelolanya aset SKPD	12 bln	100%	12 bln	100%	100%	12 bln	100%	100%	
1.15.1.15.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Meningkatnya disiplin aparatur</b>									
1.15.1.15.01.03.01.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya bagi	84 stel	100%	84 stel	100%	100%	84 stel	100%	100%	
1.15.1.15.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur</b>									
1.15.1.15.01.05.02.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya jumlah aparat yang mengikuti Bintek perundang-undangan	5 org	100%	5 org	100%	100%	5 org	100%	100%	
1.15.1.15.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan</b>									
1.15.1.15.01.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD (Lakip,LKPJ, LRPD, EKPD)	6 lap	100%	6 lap	100%	100%	6 lap	100%	100%	
1.15.1.15.01.06.03.	Penyusunan Perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya perencanaan dan anggaran SKPD	6 Dok	100%	6 Dok	100%	100%	6 Dok	100%	100%	
1.15.1.15.01.06.04.	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	Tersusunnya laporan Monev program urusan KUMKM	2 Lap	100%	2 Lap	100%	100%	2 Lap	100%	100%	

## RENJA 2018

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2016	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA			TARGET	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN TAHUN 2016		Catt	
					PROGRAM/KEGIATAN SKPD TAHUN 2016			PROGRAM/ KEGIATAN	RENJA SKPD TAHUN 2017	REALISASI		TARGET
					TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI	REALISASI		TARGET		
							(%)					
1.15.1.15.01.06.05.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran	12 bln	100%	12 bln	100%	100%	12 bln	100%	100%		
1.15.1.15.01.06.07.	Pengembangan dan Peningkatan Data dan Informasi	Tersusunnya data dan informasi	1 buku databased	100%	1 buku databased	100%	100%	1 buku databased	100%	100%		
<b>BELANJA LANGSUNG URUSAN</b>												
<b>1.15.1.15.01.27</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI</b>	<b>Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi</b>										
1.15.1.15.01.27.01	Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award	Terlaksananya penilaian koperasi berprestasi	20 kop	100%	20 kop	100%	100%	100%				
1.15.1.15.01.27.02	Pembenahan Koperasi Tidak Aktif	Terlaksananya pembenahan terhadap koperasi tidak aktif	19 kk	100%	19 kk	100%	100%	100%				
1.15.1.15.01.27.03	Pemasyarakatan Perkoperasian bagi Pemangku Kepentingan	Terlaksananya sosialisasi Perkoperasian bagi Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	870 org	90%	870 org	90%	90%	100%				
1.15.1.15.01.27.05	Revitalisasi Kelembagaan Koperasi	Terlaksananya rapat revitalisasi kelembagaan koperasi	10 kk, 570 org	95%	10 kk, 570 org	95%	95%	100%				
1.15.1.15.01.27.07	Pembubaran Koperasi Primer dan Sekunder Provinsi yang Tidak Aktif	Terlaksananya Pembubaran koperasi primer dan sekunder propinsi	10 kop	90%	10 kop	90%	90%	100%				

## RENJA 2018

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	REALISASI TARGET	TARGET DAN REALISASI KINERJA			TARGET	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN TAHUN 2016		
REKENING	DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA SKPD TAHUN 2016	KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	PROGRAM/KEGIATAN SKPD TAHUN 2016			PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2017		Catt
					TAGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI	RENJA SKPD	REALISASI	TARGET	
							(%)	TAHUN 2017	CAPAIAN	CAPAIAN	
1.15.1.15.01.27.08	Penilaian dan Usulan Penghargaan Bagi Tokoh Koperasi	Terlaksananya penilaian terhadap calon tokoh koperasi	7 orang	100%	7 orang	100%	100%	100%			
1.15.1.15.01.27.09	Sosialisasi Perkoperasian dilokasi TMMD/N	Terlaksananya sosialisasi perkoperasian	105 org	100%	105 org	100%	100%	100%			
1.15.1.15.01.27.10	Pelatihan Teknik Penghitungan Pajak bagi Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Teknik Penghitungan Pajak Bagi Koperasi	60 org, 2 akt	100%	60 org, 2 akt	100%	100%	100%			
1.15.1.15.01.27.11	Pelatihan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam bagi Pembina	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pembina tentang Koperasi	60 org, 2 akt	100%	60 org, 2 akt	100%	100%	100%			
1.15.1.15.01.27.12	Pelatihan Peningkatan Kompotensi Pembina tentang Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pembina tentang Koperasi	60 org, 2 akt	100%	60 org, 2 akt	100%	100%	100%			
1.15.1.15.01.27.13	Pelatihan Akuntansi bagi Pengurus/Pengelola Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Akuntansi bagi Pengurus/Pengelola Koperasi	60 org, 2 akt	100%	60 org, 2 akt	100%	100%	100%			
1.15.1.15.01.27.14	Sinkronisasi Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan UMKM	Terlaksananya rapat Sinkronisasi Program Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	100%	30 orang	100%	100%	100%			
1.15.1.15.01.27.17	Pembinaan Peningkatan Daya Saing Koperasi Sektor Pertanian/Perikanan	Terlaksananya bimtek Peningkatan Daya Saing Koperasi Sektor Pertanian/Perikanan	60 kop, 19 kab/kota	100%	60 kop, 19 kab/kota	100%	100%	100%			

## RENJA 2018

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	REALISASI TARGET	TARGET DAN REALISASI KINERJA			TARGET	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN TAHUN 2016		Catt
REKENING	DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA SKPD TAHUN 2016	KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	PROGRAM/KEGIATAN SKPD TAHUN 2016			PROGRAM/ KEGIATAN	REALISASI	TARGET	
					TAGET	REALISASI	TINGKAT	REALISASI	RENJA SKPD	REALISASI	TARGET
							(%)	TAHUN 2017	CAPAIAN	CAPAIAN	
1.15.1.15.01.27.19	Koordinasi Pengembangan Permodalan dan Usaha Koperasi Sektor Pertanian dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rakor pembinaan	3 kali	100%	3 kali	100%	100%	100%			
		Terlaksananya pembinaan	19 kk	100%	19 kk	100%	100%	100%			
1.15.1.15.01.27.20	Revitalisasi Usaha Koperasi	Terlaksananya Rapat Koordinasi	Rapat 2 kali, pembinaan 18	100%	Rapat 2 kali, pembinaan 18	100%	100%	100%			
		Terlaksananya pembinaan	18 kk	100%	18 kk	100%	100%	100%			
1.15.1.15.01.27.22	Peningkatan Usaha Ritel Koperasi	Terlaksananya bimbingan teknis	2 kali	100%	2 kali	100%	100%	100%			
		Terlaksananya pembinaan	19 kk	100%	19 kk	100%	100%	100%			
1.15.1.15.01.27.23	Koordinasi Pembinaan Usaha Koperasi Pasar (Koppas) dan Pengelola Pasar Rakyat	Terlaksananya bimbingan teknis	2 kali	100%	2 kali	100%	100%	100%			
		Terlaksananya pembinaan	19 kk	100%	19 kk	100%	100%	100%			
1.15.1.15.01.27.24	Peningkatan Peran Koperasi Sektor Aneka Usaha	Terlaksananya Rapat pemberdayaan KUKM	2 kali	100%	2 kali	100%	100%	100%			
		Terlaksananya pembinaan	18 kk	100%	18 kk	100%	100%	100%			

## RENJA 2018

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	REALISASI TARGET	TARGET DAN REALISASI KINERJA			TARGET	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN TAHUN 2016		Catt
					PROGRAM/KEGIATAN SKPD TAHUN 2016	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI		TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI	
REKENING	DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA SKPD TAHUN 2016	KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)	KEGIATAN	RENJA SKPD TAHUN 2017	CAPAIAN	CAPAIAN
1.15.1.15.01.27.25	Pengembangan Produk Unggulan daerah dengan Pendekatan One Village One Product (OVOP) melalui Koperasi	Terlaksananya Pengembangan Produk Unggulan Daerah	18 kop	100%	18 kop	100%	100%	100%			
		Terlaksananya pembinaan terhadap Produk Unggulan Daerah	1 Tahun	100%	1 Tahun	100%	100%	100%			
		Terlaksananya bimbingan teknis	1 kali	100%	1 kali	100%	100%	100%			
1.15.1.15.01.27.26	Pengembangan Usaha Koperasi melalui Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop)	Terlaksananya pameran produk unggulan	3 KOP	100%	3 KOP	100%	100%	100%			
		Terlaksananya Konferensi Koperasi Internasional	1 kali	100%	1 kali	100%	100%	100%			
1.15.1.15.01.27.27	Peningkatan dan Evaluasi Permodalan Koperasi	Terlaksananya Rapat Koordinasi	1 kali	100%	1 kali	100%	100%	100%			
		Terlaksananya Bimbingan Teknis	2 kali	100%	2 kali	100%	100%	100%			
1.15.1.15.01.27.36	Penyuluhan Perkoperasian Bagi Kelompok Usaha Produktif	Terlaksananya Penyuluhan Koperasi bagi Kelompok Usaha Produktif	375 kop	100%	375 kop	100%	100%	100%			
1.15.1.15.01.27.41	Peningkatan Peran Usaha Simpan Pinjam Pola Syariah	Terlaksananya Rapat Koordinasi	1 kali	100%	1 kali	100%	100%	100%			
		Terlaksananya Bimbingan Teknis	2 kali	100%	2 kali	100%	100%	100%			

## RENJA 2018

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2016	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA			TARGET	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN TAHUN 2016		Catt
					TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	RENJA SKPD TAHUN 2017	REALISASI CAPAIAN	
1.15.1.15.01.27.42	Pembinaan Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pola Konvensional	Terlaksananya Bimbingan Teknis	1 kali	100%	1 kali	100%	100%	100%			
		Terlaksananya Bimbingan Teknis	2 kali	100%	2 kali	100%	100%	100%			
1.15.1.15.01.27.44	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Simpan Pinjam	Terlaksananya Rakor dan Bimtek	2 kali	100%	2 kali	100%	100%	100%			
		Terlaksananya Bimbingan Teknis	2 kali	100%	2 kali	100%	100%	100%			
<b>1.15.1.15.01.28</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM</b>	<b>Meningkatnya Permodalan UMKMK</b>									
1.15.1.15.01.28.01	Sosialisasi dan Koordinasi Pendaftaran Merk dan Sertifikat Halal	Terlaksananya Sosialisasi dan pendaftaran merk dan halal	55 UMKM	100%	55 UMKM	100%	100%	100%			
1.15.1.15.01.28.02	Pelatihan Teknik Penyusunan Proposal bagi Pelaku UMKM	Terlaksananya Pelatihan Teknik Penyusunan Proposal bagi Pelaku UMKM	60 org 2 akt	100%	60 org 2 akt	100%	100%	100%			
1.15.1.15.01.28.03	Partisipasi Promosi Produk UMKM	Terlaksananya pameran produk UMKM	4 event	100%	4 event	100%	100%	100%			
1.15.1.15.01.28.07	Temu Mitra UMKM	Terlaksananya temu mitra UMKM	10 UMKM	50%	10 UMKM	50%	50%	100%			
1.15.1.15.01.28.08	Pengembangan UMKM Pengrajin	Terlaksananya Temu bisnis UMKM Sumbang diluar propinsi	Batam, Bandung	100%	Batam, Bandung	100%	100%	100%			

## RENJA 2018

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	REALISASI TARGET	TARGET DAN REALISASI KINERJA			TARGET	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN TAHUN 2016		Catt					
					REKENING	DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA SKPD TAHUN 2016	KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016		PROGRAM/KEGIATAN SKPD TAHUN 2016			PROGRAM/ KEGIATAN	REALISASI TARGET
												TAGE	REALISASI	TINGKAT REALISASI		
1.15.1.15.01.28.11	Perkuatan Produk UMKM	Terlaksananya peningkatan produk UMKM	10 wil	100%	10 wil	100%	100%	100%								
1.15.1.15.01.28.12	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan di Lokasi Sentra	Terlaksananya peningkatan kelembagaan usaha UMK dilokasi sentra	2 kali, 2 sentra	100%	2 kali, 2 sentra	100%	100%	100%								
1.15.1.15.01.28.16	Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM ke Perbankan dan Lembaga Non Perbankan	Terlaksananya Koordinasi dan sosialisasi program PKBL	240 org, 8 kk	100%	240 org, 8 kk	100%	100%	100%								
1.15.1.15.01.28.20	Bimtek Peningkatan Pemasaran Produk UMKM	Terlaksananya bimtek dan identifikasi UKM yang akan dipasarkan melalui internet	7 wil, 48 UKM	100%	7 wil, 48 UKM	100%	100%	100%								
1.15.1.15.01.28.21	Pelatihan Teknis Pengembangan Usaha bagi UMK Wirausaha Pemula (DAK)	Terlaksananya Pelatihan Teknis Pengembangan Usaha Bagi UMK Wirausaha Pemula	120 org 3 akt	100%	120 org 3 akt	100%	100%	100%								
1.15.1.15.01.28.22	Pelatihan Teknis Pengembangan Usaha Bagi Usaha Mikro dan Kecil Kawasan Wisata (DAK)	Terlaksananya Pelatihan Teknis Pengembangan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Kawasan Wisata	160 org 4 akt	100%	160 org 4 akt	100%	100%	100%								
1.15.1.15.01.28.23	Pelatihan Teknis Pengembangan Usaha Bagi UMK Peserta Magang Wirausaha(DAK)	Terlaksananya Pelatihan Teknis Pengembangan Usaha Bagi UMK Peserta Magang Wirausaha	120 org 3 akt	100%	120 org 3 akt	100%	100%	100%								
1.15.1.15.01.28.24	Pelatihan Teknis Pengembangan Usaha Bagi Usaha Mikro dan Kecil Bidang Sovenir(DAK)	Terlaksananya Pelatihan Teknis Pengembangan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil bidang Sovenir	40 org	100%	40 org	100%	100%	100%								
1.15.1.15.01.28.25	Pelatihan Strategi Pemasaran bagi UMK (DAK)	Terlaksananya Pelatihan Strategi Pemasaran Bagi UMK	88 org 2 akt	100%	88 org 2 akt	100%	100%	100%								
1.15.1.15.01.28.26	Pelatihan Strategi Pembiayaan bagi UMK (DAK)	Terlaksananya Pelatihan Strategi Pembiayaan Bagi UMK	80 org, 2 akt	100%	80 org, 2 akt	100%	100%	100%								

## RENJA 2018

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	REALISASI TARGET	TARGET DAN REALISASI KINERJA			TARGET	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN TAHUN 2016		Catt
REKENING	DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA SKPD TAHUN 2016	KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	PROGRAM/KEGIATAN SKPD TAHUN 2016			PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI	TARGET	
					TAGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)	RENJA SKPD TAHUN 2017	REALISASI	CAPAIAN	
1.15.1.15.01.28.27	Pelatihan Administrasi Keuangan bagi UMK Wirausaha Pemula (DAK)	Terlaksananya Pelatihan Administrasi Keuangan Bagi UMK Wirausaha Pemula	88 org 2 akt	100%	88 org 2 akt	100%	100%	100%			
1.15.1.15.01.28.28	Pelatihan Administrasi Keuangan bagi UMK Peserta Magang Wira Usaha Pemula (DAK)	Terlaksananya Pelatihan Administrasi Keuangan Bagi UMK Peserta Magang Wirausaha	80 org, 2 akt	100%	80 org, 2 akt	100%	100%	100%			
1.15.1.15.01.28.29	Pelatihan Teknis Pengembangan Usaha Bagi UMK Pengelolaan Makanan Berbasis Umbi-Umbian (DAK)	Terlaksananya Pelatihan Teknis Pengembangan Usaha Bagi UMK Pengolahan Makanan Berbasis Umbi-Umbian	40 org, 1 akt	100%	40 org, 1 akt	100%	100%	100%			
1.15.1.15.01.28.30	Pembinaan Tenaga Pendamping (DAK)	Jumlah tenaga pendamping UKM	49 org	100%	49 org	100%	100%	100%			

### 2.1.2. Capaian Renstra OPD

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 8 program dan 42 kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2016 terlaksana sangat baik.

Capaian pelaksanaan kegiatan tahun 2016 ini diharapkan dapat mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan . Sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatnya koperasi berkualitas
2. Meningkatnya daya saing dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah
3. Meningkatnya Kapasitas organisasi Dinas Koperasi, UMKM

Sehubungan dengan pencapaian sasaran tersebut diatas maka dilakukanlah pengukuran kinerja dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam bentuk persentase, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.

Pengukuran kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Tingkat pencapaian sasaran ditetapkan **sangat baik** apabila persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran sebesar diatas 95%, **baik** apabila persentase pencapaian sebesar 75% - 95%, **cukup baik** apabila persentase pencapaian sebesar 50%-75%.
- b. Persentase capaian sasaran merupakan komulatif dari capaian program-program yang digunakan untuk pencapaian kinerja sasaran yang bersangkutan

Analisis capaian kinerja tahun 2016 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan berdasarkan sasaran strategisnya sebagai berikut :

**Sasaran 1      Meningkatkan Koperasi Berkualitas****A. Perbandingan antara target dengan Realisasi Kinerja**

Kelembagaan koperasi sangat dipengaruhi oleh kualitas partisipasi anggota koperasi. Kualitas partisipasi anggota koperasi ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain faktor Intern Pengurus dan pengawas koperasi yang lemah. Hal ini disebabkan dipilihnya pengurus/pengawas yang tidak memenuhi kualifikasi, sehingga kurang berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu hal ini juga akan berdampak pada kualitas pelaksanaan RAT yang lemah. Kebanyakan anggota pasif sehingga RAT akhirnya hanya didominasi oleh sekelompok orang tertentu. Hal ini menyebabkan kesadaran anggota yang masih rendah dan kegiatan usaha koperasi yang tidak dilandaskan pada kepentingan ekonomi anggota.

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi. Indikator yang digunakan adalah:

**1. Pertumbuhan koperasi berkualitas**

Persentase koperasi berkualitas dapat dihitung dengan formulasi jumlah koperasi berkualitas tahun 2016 dikurangi jumlah koperasi berkualitas tahun 2015 dibagi jumlah koperasi berkualitas tahun 2015.

**2. Persentase Koperasi Aktif**

Persentase koperasi aktif merupakan perbandingan antara Jumlah koperasi aktif tahun 2016 dengan total jumlah koperasi pada tahun 2016.

**3. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi**

Pertumbuhan jumlah anggota koperasi dapat dihitung dari Jumlah anggota koperasi tahun 2016 – jumlah anggota koperasi tahun 2015 dibagi jumlah anggota koperasi tahun 2015.

Pencapaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Koperasi Bderkualitas  
Tahun 2015- 2016

Sasaran	Indikator Kinerja	2015			2016		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Pertumbuhan koperasi berkualitas	-	-	-	6	6	100
	Persentase Koperasi Aktif	71,5	69,88	97,73	71	71,44	100,62
	Pertumbuhan jumlah anggota koperasi	-	-	-	5,75	2,38	41,39

Dari tabel diatas dapat kami jelaskan sebagai berikut :

### 1. Pertumbuhan koperasi berkualitas

Membangun koperasi berkualitas pada hakekatnya adalah mengembangkan kepercayaan dari berbagai pihak terhadap koperasi, baik dari unsur gerakan koperasi, masyarakat, lembaga pembiayaan dan pemerintah pusat serta daerah. Koperasi perlu ditingkatkan kualitasnya agar koperasi mempunyai daya saing. Ciri-ciri koperasi berkualitas adalah : badan usaha aktif yaitu melaksanakan RAT 3 tahun berturut-turut, memiliki prinsip kohesivitas, memiliki partisipasi kuat dari anggota, kinerja yang semakin sehat yang dilihat dari jumlah asset koperasi diatas Rp. 1 Milyar, orientasi pelayanan khususnya pada anggota.

Capaian indikator pertumbuhan koperasi berkualitas adalah :

$$\frac{212-200}{200} \times 100\% = 6\%$$

**200**

Pada tahun 2016 target pertumbuhan koperasi berkualitas ditetapkan sebesar 6% dan terealisasi sebesar 6% atau pencapaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2015 jumlah koperasi berkualitas sebanyak 200 unit. Dengan adanya pembinaan dan pendampingan terhadap koperasi maka koperasi berkualitas pada tahun 2016 berjumlah 212 unit atau adanya penambahan koperasi berkualitas sebanyak 12 unit yang tersebar dibeberapa kabupaten/kota yaitu: Kota

Padang Panjang (3 unit), Kabupaten Pasaman (1 unit), Kabupaten Solok (1 unit), Kabupaten Pesisir Selatan (1 unit) Kabupaten Mentawai (1 unit) Kabupaten Dharmasraya (1 unit), Kabupaten Agam (2 unit) Kota Padang (2 unit). Koperasi berkualitas tersebut adalah koperasi yang bergerak dibidang usaha Simpan Pinjam dan sektor Riil yaitu Waserda.

Tercapainya indikator pertumbuhan koperasi berkualitas sesuai dengan target yang ditetapkan didukung oleh program kegiatan tahun 2016 yaitu melalui kegiatan : 1) Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award; 2) Revitalisasi Kelembagaan Koperasi; 3) Penilaian dan Usulan Penghargaan bagi Tokoh Koperasi; 4) Sosialisasi Perkoperasian dilokasi TMMD/N; 5) Pelatihan Teknik Penghitungan Pajak Bagi Koperasi; 6) Pelatihan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam bagi Pembina; 7) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pembina tentang Koperasi; 8) Pelatihan Akuntansi bagi Pengurus/Pengelola Koperasi; 9) Sinkronisasi Program Pendidikan dan Pelatihan.

Indikator pertumbuhan koperasi berkualitas merupakan indikator tahun awal Renstra Dinas Koperasi, UMKM tahun 2016 – 2021, dimana indikator ini tidak ada pada Renstra sebelumnya sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

## **2. Presentase koperasi aktif**

Pada tahun 2016 target persentase koperasi aktif sebesar 71 % dengan realisasi sebesar 71,44 % atau pencapaian kinerja sebesar 100,62 % dari target yang ditetapkan.

Capaian indikator presentase koperasi aktif adalah :

$$\frac{2.891}{4.047} \times 100\% = 71,44\%$$

Dalam tahun 2016 dari jumlah koperasi sebanyak 4.047 unit, aktif sebanyak 2.891 unit dan tidak aktif sebanyak 1.156 unit. Jika dibandingkan

dengan pencapaian kinerja tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 1,56%. Hal ini disebabkan adanya penurunan Koperasi tidak aktif melalui pembubaran Koperasi maupun mengaktifkan kembali Koperasi yang berpotensi untuk dapat diaktifkan, disamping itu terjadi penumbuhan Koperasi baru.

Selain itu apabila dilihat dari persentasi koperasi aktif di masing-masing kabupaten/kota, ada 11 kabupaten/kota yang persentase koperasi aktifnya diatas 70%, ( Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kota Bukittinggi Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman) dan 8 Kabupaten dengan realisasi persentase koperasi aktif dibawah 70% ( Kab. Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Solok Selatan, Kab. Pesisir Selatan Kab. Dharmasraya, dan Kab. Kep. Mentawai), seperti pada tabel dibawah ini:

Persentase Jumlah Koperasi Aktif Kab/Kota  
Tahun 2016

NO	Kab/Kota	Jumlah	Aktif	%
1	Kab. Agam	263	202	76,81
2	Kab. Pasaman	231	109	47,19
3	Kab. Pasaman Barat	331	299	90,33
4	Kab. 50 Kota	217	137	63,13
5	Kab. Solok	167	87	52,10
6	Kab. Solok Selatan	131	65	49,62
7	Kab. Padang Pariaman	250	190	76,00
8	Kab. Pess. Selatan	333	221	66,37
9	Kab. Tanah Datar	228	205	89,91
10	Kab. Sijunjung	178	67	37,64
11	Kab. Dharmasraya	204	97	47,55
12	Kab. Kep. Mentawai	133	32	24,06
13	Kota Bukittinggi	105	87	82,86
14	Kota Padang	729	676	92,73
15	Kota Sawahlunto	81	69	85,19
16	Kota Padang Panjang	73	56	76,71
17	Kota Solok	57	49	85,96
18	Kota Payakumbuh	156	132	84,62
19	Kota Pariaman	82	62	75,61
20	Propinsi ( Primer dan Sekunder)	98	49	50,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>4047</b>	<b>2891</b>	<b>71,44</b>

Sumber data : Laporan Kab/Kota

Dalam rangka peningkatan koperasi aktif di Provinsi Sumatera Barat, Dinas Koperasi, UMKM telah melakukan berbagai upaya dalam pembinaan terhadap koperasi aktif dan pembenahan kepada koperasi tidak aktif. Upaya yang telah dilakukan adalah dalam bentuk penyuluhan, bimbingan teknis, penilaian koperasi, peningkatan kompetensi SDM pengelola dan pembina koperasi, dan pendampingan oleh petugas penyuluh lapangan di 19 Kab/Kota sebanyak 20 orang serta penguatan kelembagaan agar persentase koperasi aktif meningkat dari tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya persentase koperasi aktif mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2015 persentase koperasi aktif sebesar 69,88% tahun 2014 sebesar 69,03%, tahun 2013 sebesar 70,48%, tahun 2012 sebesar 69,36% dan tahun 2011 sebesar 66,31%.

### **3. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi**

Target pertumbuhan jumlah anggota koperasi pada tahun 2016 sebesar 5,75% terealisasi sebesar 2,38% atau dengan capaian kinerja sebesar 41,39%.

Capaian indikator pertumbuhan jumlah anggota koperasi adalah :

$$\frac{547.784 - 535.052}{535.052} \times 100\% = 6\%$$

**535.052**

Dalam tahun 2016 ini jumlah anggota koperasi sebanyak 547.784 orang dan tahun 2015 jumlah anggota koperasi sebanyak 535.052 orang, dengan rincian anggota per kabupaten/kota sebagai berikut :

Jumlah Anggota Koperasi Kab/Kota  
Tahun 2015-2016

NO	Kab/Kota	Jumlah Anggota Tahun 2015	Jumlah Anggota Tahun 2016	Bertambah ( Berkurang)
1	Kab. Agam	37.127	37.038	(89)
2	Kab. Pasaman	24.951	26.136	1.185
3	Kab. Pasaman Barat	46.110	47.113	1.003
4	Kab. 50 Kota	40.198	40.743	545
5	Kab. Solok	24.984	24.678	(306)
6	Kab. Solok Selatan	5.883	6.402	519
7	Kab. Padang Pariaman	25.499	25.848	349
8	Kab. Pess. Selatan	19.234	19.924	690
9	Kab. Tanah Datar	38.396	38.133	(263)
10	Kab. Sijunjung	30.739	31.790	1.051
11	Kab. Dharmasraya	37.866	37.950	84
12	Kab. Kep. Mentawai	6.341	7.137	796
13	Kota Bukittinggi	16.945	17.433	488
14	Kota Padang	116.133	122.550	6.417
15	Kota Sawahlunto	9.114	10.096	982
16	Kota Padang Panjang	8.156	7.767	(389)
17	Kota Solok	10.199	9.201	(998)
18	Kota Payakumbuh	18.335	18.650	315
19	Kota Pariaman	8.692	9.018	326
20	Propinsi ( Primer dan Sekunder)	10.150	10.177	27
<b>JUMLAH</b>		<b>535.052</b>	<b>547.784</b>	<b>12.732</b>

Dari tabel diatas dapat kami jelaskan bahwa ada 5 kabupaten/kota yang mengalami penurunan jumlah anggota koperasi yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang dan Kota Solok. Disamping itu ada beberapa Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan jumlah anggota yang cukup signifikan yaitu Kota padang, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, dan Kabupaten Sijunjung.

Capaian ini terealisasi sesuai cengan target karena didukung oleh program kegiatan tahun 2016 yaitu melalui kegiatan : 1) Pemasyarakatan Perkoperasian bagi Pemangku Kepentingan dan Masyarakat; 2) Penyuluhan Koperasi bagi Kelompok Usaha Produktif.

Indikator pertumbuhan jumlah anggota koperasi merupakan indikator tahun awal Renstra Dinas Koperasi, UMKM tahun 2016 – 2021, dimana

indikator ini tidak ada pada Renstra sebelumnya sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

## **B. Analisa Penyebab Peningkatan/Penurunan Realisasi dari Target Kinerja**

Pada sasaran meningkatnya koperasi berkualitas pencapaian indikator kinerja terlihat bahwa indikator pertumbuhan jumlah anggota koperasi tidak mencapai target sedangkan indikator pertumbuhan koperasi berkualitas mencapai target dan persentase koperasi aktif pencapaiannya melebihi target yang ditetapkan. Faktor penyebab peningkatan/penurunan capaian realisasi adalah :

1. Pertumbuhan koperasi berkualitas ( dari target kinerja sebesar 6% terealisasi 6% dengan capaian sebesar 100%). Tercapainya target yang telah ditetapkan disebabkan adanya peningkatan koperasi yang melaksanakan RAT serta meningkatnya asset koperasi pada tahun 2016. Karena peningkatan asset dan pelaksanaan RAT dari koperasi merupakan indikator dalam penentuan koperasi berkualitas.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam peningkatan pertumbuhan koperasi berkualitas adalah melalui penetapan koperasi berprestasi. Pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Koperasi, UKM telah melakukan penilaian terhadap koperasi berprestasi. Dari penilaian tersebut ditetapkan koperasi sebanyak 5 koperasi dengan peringkat sebagai berikut:

- Koperasi Berprestasi Peringkat I yaitu KSU Keluarga Besar BPD Sumbar
- Koperasi Berprestasi Peringkat II yaitu Koperasi wanita Koto Kaciak Kab. Lima Puluh Kota
- Koperasi Berprestasi Peringkat III yaitu KPN Matur Kab. Agam
- Koperasi Berprestasi Peringkat IV yaitu Primkopres Kota Pariaman
- Koperasi Berprestasi Peringkat V yaitu KPN Pemko Padang

Selain itu untuk tingkat nasional, pada pelaksanaan hari Koperasi ke-69 di Provinsi Jambi, pemerintah pusat telah memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh penggerak koperasi, yaitu :

- Bakti Koperasi yang diberikan kepada Walikota Sawahlunto dan walikota Pariaman, Walikota Payakumbuh, Kepala dinas Koperindag Kab. Sijunjung
  - Satyalencana Wirakarya yang diberikan kepada Wartawan Haluan yaitu Rusdi Bais.
2. Pada indikator peningkatan capaian realisasi persentase koperasi aktif ( dari target kinerja sebesar 71% terealisasi 71,44% dengan capaian sebesar 100,62%) adalah karena terjadinya penurunan jumlah koperasi yang tidak aktif. Hal ini dilakukan melalui program kegiatan yang mendukung peningkatan jumlah koperasi aktif, yaitu melalui pembenahan koperasi tidak aktif serta pembubaran koperasi priomer dan sekunder provinsi yang tidak aktif.
  3. Untuk indikator pertumbuhan jumlah anggota koperasi dari target kinerja sebesar 5,75% terealisasi 2,38% dengan capaian sebesar 41,39% adalah karena adanya penurunan jumlah anggota koperasi yang sangat signifikan yaitu pada Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang dan Kota Solok. Penurunan jumlah anggota koperasi disebabkan karena adanya pembubaran koperasi. Pada tahun 2016 terjadi penurunan jumlah koperasi yaitu di Kota Padang Panjang sebanyak 4 koperasi dan Kota Solok sebanyak 7 koperasi.

## Sasaran 2

### Meningkatnya daya saing dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah

#### A. Perbandingan antara Target dan realisasi Kinerja

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM dalam mendukung perekonomian daerah, dengan indicator kinerja :

**1. Pertumbuhan volume usaha koperasi sektor riil**

Volume Usaha koperasi adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan. Presentase peningkatan volume usaha koperasi sektor riil dapat dihitung dari jumlah volume usaha sektor riil tahun 2016 dikurang volume usaha sektor riil tahun 2015 bagi volume usaha sektor riil tahun 2015 dikali 100%.

**2. *Pertumbuhan volume usaha simpan pinjam koperasi***

Volume Usaha simpan pinjam koperasi adalah total nilai volume pemberian pinjaman kepada anggota koperasi pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan. Presentase peningkatan volume usaha simpan pinjam koperasi dapat dihitung dari jumlah volume usaha simpan pinjam tahun 2016 dikurang volume usaha simpan pinjam tahun 2015 dibagi volume usaha simpan pinjam tahun 2015 dikali 100%.

**3. *Pertumbuhan permodalan usaha simpan pinjam koperasi***

Permodalan usaha simpan pinjam koperasi adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan. Presentase pertumbuhan permodalan usaha simpan pinjam koperasi dapat dihitung dari jumlah modal usaha simpan pinjam tahun 2016 dikurang jumlah modal usaha simpan pinjam tahun 2015 dibagi jumlah modal usaha simpan pinjam tahun 2015 dikali 100%.

**4. *Peningkatan usaha mikro binaan menjadi usaha kecil***

Peningkatan usaha mikro binaan menjadi usaha kecil adalah jumlah usaha mikro binaan yang meningkat volume usahanya menjadi usaha kecil dibagi jumlah usaha mikro binaan dikali 100%.

### 5. *Peningkatan usaha kecil binaan menjadi usaha menengah*

Peningkatan usaha kecil binaan menjadi usaha menengah adalah jumlah usaha kecil binaan yang meningkat volume usahanya menjadi usaha menengah dibagi jumlah usaha kecil binaan dikali 100%.

### 6. **Jumlah produk UMKM terstandarisasi (SNI/Halal/BPPOM/ISO,dll)**

Pertumbuhan dan perkembangan UMKM cukup pesat, namun belum diikuti dengan peningkatan kualitas produk maupun kemampuan untuk bersaing. Dalam rangka pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean dan pasar global sekaligus memperluas pasar dalam negeri, perlu dilakukan standarisasi dan sertifikasi terhadap manajemen mutu dan kualitas produk UMKM. Jumlah produk UMKM terstandarisasi adalah jumlah produk UMKM yang difasilitasi untuk mendapatkan standarisasi produk berupa pendaftaran merk dan sertifikat halal.

Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya daya saing dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya daya saing dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan volume usaha koperasi sektor riil	1,5%	2,42%	161,33%
	Pertumbuhan volume usaha simpan pinjam koperasi	1,2%	0,95%	79,17%
	Pertumbuhan permodalan usaha simpan pinjam koperasi	1,3%	5,11%	393,08%
	Peningkatan usaha mikro binaan menjadi usaha kecil	15%	15,67%	104,47%
	Peningkatan usaha kecil binaan menjadi usaha menengah	5%	5%	100%
	Jumlah produk UMKM terstandarisasi (SNI/Halal/BPPOM/ISO,dll)	40 UMKM	55 UMKM	137,5%

Dari tabel tersebut diatas dapat kami jelaskan sebagai berikut :

#### 1. *Pertumbuhan volume usaha koperasi sektor riil*

Pencapaian indikator pertumbuhan volume usaha koperasi sektor riil pada tahun 2016 dari target 1,5% adalah sebesar 2,42 % atau dengan

capaian sebesar 161,33%. Pencapaian volume usaha koperasi sektor riil sebesar 2,42% dengan penjabaran :

$$\frac{680.693.030.000 - 664.577.972.000}{664.577.972.000} \times 100\%$$

Pada tahun 2015 volume usaha koperasi sektor riil sebesar Rp. 664.577.972.000 dan tahun 2016 sebesar Rp. 680.693.030.000. Meningkatnya volume usaha koperasi sektor riil dipengaruhi oleh koperasi yang bergerak dibidang usaha pertanian dan perkebunan seperti koperasi sawit, karet jagung, dll.

## **2. *Pertumbuhan volume usaha simpan pinjam koperasi***

Pada tahun 2016 capaian indikator pertumbuhan volume usaha simpan pinjam koperasi dari target sebesar 1,2% terealisasi sebesar 0,95% atau dengan capaian sebesar 79,17%, dengan penjabaran sebagai berikut :

$$\frac{3.292.708.987.000 - 3.261.611.858.000}{3.261.611.858.000} \times 100\% = 0,95\%$$

Volume usaha simpan pinjam koperasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 3.261.611.858.000, mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 3.292.708.987.000. Indikator pertumbuhan volume usaha simpan pinjam koperasi merupakan indikator yang menggambarkan perkembangan usaha simpan pinjam koperasi. Koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam dalam perkembangannya telah menyesuaikan dengan dinamika dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk itu dalam menjalankan usaha simpan pinjam koperasi wajib memiliki standar operasional manajemen yang sesuai dengan perubahan tatanan ekonomi tersebut.

Pemerintah Propinsi Sumatera Barat melalui Dinas Koperasi, UMKM selalu berupaya untuk meningkat sistem manajemen koperasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam peningkatan tingkat usaha simpan pinjam

tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan pembinaan seperti rapat koordinasi, bimbingan teknis, dan pelatihan kepada petugas penilai kesehatan untuk 19 kabupaten/kota se- Sumatera Barat.

### **3. *Pertumbuhan permodalan usaha simpan pinjam koperasi***

Pencapaian pertumbuhan permodalan usaha simpan pinjam koperasi pada tahun 2016 sebesar 5,11% dari target sebesar 1,3% atau dengan capaian sebesar 393,08%, dengan penjabaran sebagai berikut :

$$\frac{3.625.986.569.000 - 3.449.730.151.000}{3.449.730.151.000} \times 100\% = 5,11\%$$

Pertumbuhan permodalan usaha simpan pinjam dipengaruhi oleh modal yang dikelola oleh koperasi. Modal koperasi tersebut berasal dari: 1) modal sendiri yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan; 2) modal pinjaman dari pihak lain.

### **4. *Peningkatan usaha mikro binaan menjadi usaha kecil***

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha dengan aset paling tinggi sebesar Rp. 50 juta dan omset paling tinggi sebesar Rp. 300 juta. Sedangkan usaha kecil adalah usaha dengan aset antara Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 juta dan omset sebesar Rp. 300 juta sampai dengan Rp. 2,5 milyar.

Pada tahun 2016 jumlah usaha mikro binaan Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat sebanyak 300. Usaha mikro tersebut telah diberikan pelatihan, pendampingan, dan penyuluhan sehingga telah meningkat menjadi usaha kecil. Peningkatan usaha mikro binaan menjadi usaha kecil pada tahun 2016 dengan target sebesar 15% terealisasi sebesar 15,67% dengan penjabaran :

$$\frac{47}{300} \times 100\% = 15,67\%$$

Perkembangan sektor usaha mikro hingga saat ini jumlahnya telah menggelembung sedemikian besar bahkan hampir menyamai jumlah orang yang bekerja di sektor formal lainnya. Sehingga saat ini tidak bisa dikatakan lagi bahwa sektor usaha mikro cuma sebagai tempat penampungan sementara bagi para pekerja yang belum bisa masuk ke sektor formal lainnya, tetapi keberadaannya justru sebagai motor pertumbuhan aktivitas ekonomi (perkotaan) karena jumlah penyerapan tenaga kerjanya yang demikian besar (sama dengan jumlah tenaga kerja di sektor formal).

Keberadaan usaha mikro memang sangat membantu dalam perekonomian masyarakat, namun pemerintah harus berupaya untuk meningkat usaha mikro tersebut menjadi usaha kecil agar usaha kecil ini dapat bersaing dalam perdagangan baik di dalam negeri maupun pada pasar bebas yang sudah berlangsung saat ini.

Pada tahun 2016 dalam rangka peningkatan usaha mikro binaan menjadi usaha kecil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi adalah melalui perkuatan produk, pembinaan dilokasi sentra, bimtek pemasaran produk serta pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan usaha.

#### **5. *Peningkatan usaha kecil binaan menjadi usaha menengah***

Usaha Menengah adalah usaha dengan aset sebesar Rp. 500 juta s/d 10 milyar dan omset Rp. 2,5 milyar s/d Rp. 50 milyar. Peningkatan usaha kecil binaan menjadi usaha menengah pada tahun 2016 dari target sebesar 5% terealisasi sebesar 5% atau dengan capaian 100%, dengan penjabaran :

$$\frac{10}{200} \times 100\% = 5\%$$

Jumlah usaha kecil binaan pada tahun 2016 adalah sebanyak 200 orang. Dari jumlah tersebut telah meningkat usahanya menjadi usaha menengah sebanyak 10 orang. Usaha kecil yang mengalami peningkatan adalah usaha yang bergerak dibidang bordiran, pelaminan dan makanan.

#### **6. Jumlah produk UMKM terstandarisasi (SNI/Halal/BPPOM/ISO,dll)**

Kurangnya pemahaman terhadap standarisasi produk UMKM menjadi salah satu penyebab produk-produk UMKM tidak mampu bersaing dengan produk dari luar negeri. Karena tanpa dilengkapi uji standarisasi yang difasilitasi Badan Standarisasi Nasional (BSN), dianggap kurang berkualitas. Berbagai produk UMKM yang membanjiri pasaran belum seluruhnya memiliki sertifikat standarisasi SNI. Sehingga banyak produk UMKM yang sebenarnya memiliki kualitas bagus bahkan memiliki nilai ekspor akan tetapi kalah bersaing hanya karena persoalan sertifikasi standarisasi produk

Pertumbuhan dan perkembangan UMKM cukup pesat, namun belum diikuti dengan peningkatan kaulitas produk maupun kemampuan untuk bersaing. Dalam rangka pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean dan pasar global sekaligus memperluas pasar dalam negeri, perlu dilakukan standarisasi dan sertifikasi terhadap manajemen mutu dan kualitas produk UMKM. Indikator jumlah produk UMKM terstandarisasi pada tahun 2016 dari target sebanyak 40 UMKM terealisasi sebanyak 55 UMKM atau dengan capaian sebesar 137.5%.

#### **B. Analisa Penyebab Peningkatan/Penurunan Realisasi dari Target**

Pada sasaran meningkatnya daya saing dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah pencapaian indikator kinerja terlihat bahwa indikator pertumbuhan volume usaha simpan pinjam koperasi tidak mencapai target sedangkan indikator Pertumbuhan volume usaha koperasi sektor riil, Pertumbuhan permodalan usaha simpan pinjam koperasi, Peningkatan usaha mikro binaan menjadi usaha kecil, Peningkatan usaha kecil binaan menjadi usaha menengah, Jumlah produk UMKM

terstandarisasi (SNI/Halal/BPPOM/ISO,dll) mencapai target bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Faktor penyebab peningkatan/penurunan capaian realisasi adalah :

**1. Pertumbuhan volume usaha koperasi sektor riil**

Peningkatan capaian realisasi indikator pertumbuhan volume usaha koperasi sektor riil dari disebabkan naiknya harga komoditi perkebunan seperti sawit dan karet yang cukup signifikan mulai dari semester kedua tahun 2016. Harga sawit yang biasanya berkisar antara Rp. 1.200,- naik menjadi Rp. 2.150,-. Sedangkan karet dari harga Rp. 6.000,- naik menjadi Rp. 11.000,-. Disamping itu koperasi yang mempunyai usaha ritel/wasenda dengan adanya kenaikan beberapa jenis barang juga menyebabkan kenaikan omset pada koperasi tersebut.

**2. Pertumbuhan volume usaha simpan pinjam koperasi**

Pertumbuhan volume usaha simpan pinjam koperasi dari target sebesar 1,2% terealisasi sebesar 0.95% atau dengan capaian sebesar 79,17%. Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan disebabkan :

- a) banyaknya koperasi yang tidak aktif sehingga mempengaruhi volume usaha koperasi terutama usaha simpan pinjam koperasi.
- b) banyaknya masyarakat yang memanfaatkan pembiayaan lain yang bersifat ilegal.

**3. Pertumbuhan modal usaha simpan pinjam koperasi**

Pertumbuhan modal usaha simpan pinjam koperasi dari target sebesar 1,3% terealisasi sebesar 5,11% atau dengan capaian sebesar 393,08%. Peningkatan modal usaha simpan pinjam ini dipengaruhi oleh beberapa hal :

- a) adanya program pinjaman dari pemerintah yang dapat dimanfaatkan oleh koperasi dalam peningkatan modal usaha.

- b) tingginya partisipasi anggota dalam meningkatkan modal koperasi melalui simpanan anggota
- c) peningkatan jumlah anggota koperasi sehingga meningkat pula modal koperasi.

#### **4. Peningkatan usaha mikro binaan menjadi usaha kecil**

Peningkatan usaha mikro binaan menjadi usaha kecil pada tahun 2016 dari target sebesar 15% terealisasi sebesar 15,67% atau dengan capaian 104,47%. Peningkatan realisasi dari target yang telah ditetapkan disebabkan karena adanya dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada usaha mikro. Setiap tahun kredit tersebut mengalami pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit perbankan. Selain itu keberhasilan pertumbuhan usaha Usaha Mikro menjadi usaha kecil, juga tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit. Berbagai skim Kredit/pembiayaan UMKM diluncurkan oleh pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan, perternakan dan perkebunan.

#### **5. Peningkatan usaha kecil binaan menjadi usaha menengah**

Peningkatan usaha kecil binaan menjadi usaha menengah pada tahun 2016 dari target sebesar 5% terealisasi sebesar 5% atau dengan capaian 100%. Peningkatan realisasi dari target yang telah ditetapkan disebabkan karena adanya peningkatan segmentasi pasar melalui pengembangan produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu dengan adanya jaringan kerjasama yang baik antar pelaku pasar juga merupakan salah satu penyebab adanya peningkatan usaha kecil menjadi usaha menengah. Jaringan kerjasama yang telah dilakukan adalah melalui promosi atau pameran dan temu bisnis dengan daerah-daerah tetangga yang sesuai dengan segmen pasar yang dihasilkan.

## 6. Jumlah produk UMKM terstandarisasi (SNI/Halal/BPPOM/ISO,dll)

Indikator jumlah produk UMKM terstandarisasi pada tahun 2016 dari target sebanyak 40 UMKM terealisasi sebanyak 55 UMKM atau dengan capaian sebesar 137.5%. Realisasi melebihi target karena adanya penambahan anggaran untuk memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan produk mengingat cukup banyaknya UMKM yang mengajukan permohonan untuk standarisasi produk.

### Sasaran 3

### Meningkatnya Kapasitas organisasi Dinas Koperasi, UMKM

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kinerja Dinas koperasi dan UMKM. Berbeda dengan sasaran 1 dan 2, untuk sasaran 3 ini, capaian dari target merupakan capaian pada tahun 2015, dengan indicator kinerja :

#### a. Indikator Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Untuk indikator Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sumatera Barat memperoleh Predikat Kepatuhan Standar pelayanan dari OMBUDSMAN RI tahun 2015 sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendapatkan predikat Hijau.

#### b. Indikator Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pada tahun 2016 sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah No. 06.15/INSP-LAKIP/IV-2016 laporan kinerja Dinas Koperasi, UMKM mendapat nilai 67,83 atau masuk dalam kategori B.

**c. Indikator Penyampaian Laporan Keuangan tepat waktu**

Laporan keuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai: (1) aset; (2) kewajiban; (3) ekuitas; (4) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; dan (5) arus kas

**2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD**

Program pembangunan Provinsi Sumatera Barat diantaranya adalah untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang diarahkan pada pemberdayaan rakyat melalui pengembangan usaha produktif dan pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Salah satu pola yang sesuai dengan pembangunan yang berorientasi kepada rakyat adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang berorientasi pada peningkatan partisipasi produktif masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi.

Pihak yang paling berperan dalam pengembangan koperasi dan UMKM dalam pembangunan ekonomi di Sumatera Barat adalah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi di bidang Koperasi dan UMKM serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Tugas yang diamanatkan kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat memegang peran yang strategis dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Provinsi Sumatera Barat. Hasil pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang ditargetkan dengan tolok ukur keberhasilan yang tercermin dalam indikator-indikator makro. Hasil-hasil pembangunan sektor koperasi dan UMKM tercermin dari indikator makro seperti : PDRB, persen pertumbuhan koperasi, persen peningkatan kemitraan, pertumbuhan volume usaha.

Secara umum hasil pelaksanaan kegiatan sektor koperasi dan UMKM dalam 5 tahun terakhir ini terutama dalam Perkembangan Koperasi dan

UMKM adalah menunjukkan trend yang meningkat dengan perubahan rata-rata setiap tahunnya 2,95%. Koperasi yang aktif serta koperasi yang melaksanakan RAT mengalami penurunan, kondisi ini antara lain disebabkan kesibukan pengurus, kekurangan seriusan pengurus ataupun kekurangan kemampuan pengurus. Perkembangan koperasi, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Pada tahun 2015 jumlah koperasi di Sumatera Barat sebanyak 3.892 koperasi, dengan koperasi yang aktif sebanyak 2.723 unit dan tidak aktif sebanyak 1.169 unit. Jumlah koperasi yang ada meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2014 terdapat 3.807 unit koperasi dan pada tahun 2013 sebanyak 3.747 unit koperasi. Koperasi tidak aktif mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini merupakan masalah yang harus segera diselesaikan mengingat pentingnya peranan koperasi bagi pembangunan dan perkembangan ekonomi daerah. Koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun 2010 sebanyak 1.290 unit koperasi. Pelaksanaan RAT ini sedikit menurun dibandingkan pada tahun 2009 dengan jumlah 1.333 unit koperasi.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Jumlah Koperasi dan UMKM yang besar dari segi kuantitas masih belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya sehingga kinerja UMKM masih tertinggal. Ketertinggalan kinerja UMKM tersebut disebabkan terutama oleh kekurangmampuan UMKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Tingkat kinerja yang demikian juga berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi, teknologi, pasar dan produksi.

Sehubungan dengan itu perlu ada analisis yang berkenaan dengan faktor eksternal dan internal (analisa SWOT) yang berpengaruh terhadap keberlanjutan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat. Faktor internal yang berdampak positif dianggap sebagai kekuatan dan yang berdampak negatif dianggap sebagai kelemahan.

### 2.3.1. Kondisi Saat Ini

Pengembangan Koperasi dan UMKM di Propinsi Sumatera Barat pada saat ini dipengaruhi oleh :

1. **Rendahnya produktifitas.** Produktifitas KUMKM masih dinyatakan rendah, sehingga akan menyebabkan skala yang dikelola terutama skala mikro dan kecil belum layak secara ekonomi. Dengan demikian perlu dilakukan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan usahanya. Rendahnya produktifitas ini juga didukung dengan lemahnya penguasaan dibidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.
2. **Terbatasnya akses sumber daya produktif.** Usaha mikro dan kecil menghadapi masalah dalam peningkatan kapasitas usahanya, yaitu kurang tersedia collateral apabila akan memperoleh pinjaman/pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan. Dengan demikian perlu dikembangkan skim-skim pembiayaan yang membantu usaha mikro dan kecil, yaitu pembiayaan dengan pola syariah, juga dilakukan pendampingan dalam pemanfaatan pembiayaan tersebut.
3. **Rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi.** Akhir-akhir ini beberapa Koperasi belum menjalankan tata kelola koperasi yang baik (good cooperative governance). Hal ini disebabkan bahwapendirian koperasi belum didasari atas kepentingan dan kesamaan ekonomi yang sama diantara anggota. Namun lebih menekan pada aspek bisnis saja, kurang memperhatikan prinsip-prinsip koperasi yang menjadi landasan operasionalnya. Kelembagaan dan organisasi belum dikelola secara sistem manajemen yang memadai, yaitu sebagian besar belum memiliki rencana jangka menengah dan panjang.
4. **Rendahnya kinerja Koperasi.** Rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi manajemen Koperasi akan menyebabkan kurang optimalnya kinerja Koperasi. Dengan demikian diperlukan beberapa kegiatan usaha yang mengarah pada keterkaitan usaha koperasi dan usaha anggotanya.

Disamping itu manajemen koperasi perlu dikelola dengan sistem manajemen yang memadai, yaitu memiliki rencana jangka menengah dan panjang serta mengembangkan manajemen kinerja koperasi dengan model Balanced Score Card (BSC) dengan beberapa penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan karakteristik koperasi.

- 5. Kurang kondusifnya iklim usaha**, pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) memerlukan iklim yang kondusif, yaitu prosedur perizinan yang belum dilakukan secara transparan, biaya transaksi perizinan yang mahal, pungutan secara tidak resmi. Peraturan-peraturan yang menghambat perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah dengan berbagai alasan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **2.3.2. Kondisi yang diharapkan**

Untuk mendukung pengembangan Koperasi dan UMKM di Propinsi Sumatera Barat pada saat ini sangat dipengaruhi :

- 1. Produktifitas yang tinggi.** Untuk meningkatkan produktifitas perlu dilakukan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan usahanya melalui manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta peningkatan kompetensi kewirausahaan UMKM.
- 2. Akses sumber daya produktif.** Peningkatan skim-skim pembiayaan yang membantu usaha mikro dan kecil, yaitu pembiayaan dengan pola syariah, juga dilakukan pendampingan dalam pemanfaatan pembiayaan tersebut.
- 3. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi.** Koperasi harus menjalankan tata kelola koperasi yang baik (good cooperative governance) agar koperasi dapat berkembang secara profesional.
- 4. Peningkatan kinerja Koperasi.** Kinerja koperasi yang baik akan dapat membantu peningkatan usaha koperasi
- 5. Iklim usaha yang baik,** Iklim usaha yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu prosedur perizinan yang transparan, biaya transaksi perizinan yang murah, tidak adanya pungutan tidak resmi.

### 2.3.3. Kondisi Eksternal

#### 1. Peluang

- a. Peningkatan tata kelola kelembagaan organisasi koperasi dan UMKM

Nilai-nilai dan prinsip koperasi dapat menjadikan koperasi maju dan mampu membantu anggotanya melalui upaya kolektif yang produktif, efektif, efisien dan berkelanjutan.

- b. Peningkatan usaha koperasi dan UMKM

Kebersamaan dalam pengelolaan koperasi akan mengurangi resiko persaingan antara anggota, meningkatkan posisi tawar terhadap pihak eksternal dan menghasilkan manfaat yang adil.

- c. Peningkatan daya saing produk koperasi dan UMKM

Dengan adanya pasar bebas atau globalisasi perekonomian dunia akan menjadi peluang bagi pelaku Koperasi dan UMKM yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya saing.

- d. Peningkatan skala usaha UMKM

Globalisasi dan era digital merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh UMKM dalam mengembangkan usaha.

#### 2. Ancaman

- a. Peningkatan tata kelola kelembagaan organisasi koperasi dan UMKM

▪ Jumlah koperasi dan UMKM yang cukup besar ini menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk mengoptimalkan potensi ekonomi anggota koperasi dan pelaku-pelaku UMKM serta kelompok-kelompok produktif lainnya

▪ Jumlah koperasi dan UMKM yang cukup besar ini menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan peran koperasi dalam mewujudkan kegiatan usaha kolektif yang melibatkan partisipasi aktif anggota.

- b. Peningkatan usaha koperasi dan UMKM  
Pertumbuhan volume usaha koperasi menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan UMKM, karena masih rendahnya kinerja usaha koperasi sektor riil.
- c. Peningkatan daya saing produk koperasi dan UMKM  
Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat baik dari segi kelembagaan maupun produk yang dihasilkan koperasi dan UMKM.
- d. Peningkatan skala usaha UMKM  
Pertumbuhan UMKM menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumbar karena sulitnya tumbuh usaha mikro menjadi usaha skala yang lebih besar atau naik kelas.

#### **2.3.4. Kondisi Internal**

##### **1. Kekuatan**

- a. Adanya tupoksi dan program kerja Dinas Koperasi, UKM
- b. Adanya dukungan pembiayaan (APBD/APBN) dan kerjasama stakeholder terkait.
- c. Sarana dan fasilitas yang tersedia dapat digunakan untuk pengembangan koperasi dan UMKM
- d. Dukungan instansi lainnya seperti BUMN, BUMD.

##### **2. Kelemahan**

- a. Keterbatasan tenaga fungsional dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan dan penyuluhan koperasi kepada masyarakat maupun gerakan koperasi.
- b. Sikap kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam berusaha relatif lemah.
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mengakses jangkauan pelayanan dan pembinaan terhadap gerakan koperasi dan UMKM
- d. Sumber-sumber informasi dan pemberitaan yang berkaitan pengembangan dan program koperasi serta UMKM.

#### **2.3.5. Isu Strategis yang dihadapi**

Jumlah Koperasi dan UMKM yang besar dari segi kuantitas masih belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya sehingga kinerja KUMKM masih tertinggal. Keteringgalan kinerja KUMKM tersebut disebabkan terutama oleh keterbatasan kemampuan KUMKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Tingkat kinerja yang demikian juga berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi, teknologi, pasar dan faktor produksi.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah perkembangan iklim usaha yang masih kurang mendukung yang disebabkan, antara lain, oleh (1) ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan, dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; (2) proses bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat; (3) lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM; dan (4) masih munculnya peraturan-peraturan daerah yang menghambat, termasuk pengenaan pungutan-pungutan baru kepada Koperasi dan UMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Masih terbatasnya sumber daya financial juga merupakan masalah utamabagi usaha mikro. Usaha mikro yang bermodal kecil umumnya tidak berbadan hukum dan masih menerapkan manajemen yang sangat sederhana. Oleh karena itu, usaha mikro ini sulit untuk memperoleh akses dari lembaga keuangan perbankan.

Permasalahan khusus yang dihadapi dalam pengembangan koperasi adalah masih belum meluasnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik/khas dibandingkan dengan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik berkoperasi yang paling benar (best practices). Bersamaan dengan masalah tersebut, koperasi dan UMKM juga menghadapi tantangan, terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.

### **2.3.6. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD Terkait Koordinasi dengan Pusat dan Daerah Kabupaten/Kota**

Program pembangunan Provinsi Sumatera Barat diantaranya adalah untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang diarahkan pada pemberdayaan rakyat melalui pengembangan usaha produktif dan pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Salah satu pola yang sesuai dengan pembangunan yang berorientasi kepada rakyat adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang berorientasi pada peningkatan partisipasi produktif masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi. Kegiatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada umumnya dan melibatkan masyarakat adalah koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah melalui berbagai sektor usaha antara lain sektor koperasi dan UMKM.

Pihak yang paling berperan dalam pengembangan koperasi dan UMKM dalam pembangunan ekonomi di Sumatera Barat adalah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi di bidang Koperasi dan UMKM serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Guna mengoptimalkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam hal pembinaan terhadap koperasi dan UMKM yang ada di Sumatera Barat, serta dalam menyusun program dan kegiatan selalu berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI serta Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota dalam bentuk:

1. Melaksanakan rapat koordinasi pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam rangka sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan dengan dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota.
2. Mengikuti Bimbingan teknis, rapat penyusunan perencanaan, rapat teknis perencanaan, rapat regional, rapat koordinasi nasional dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan harapan terdapat sinergitas

pembangunan antara pusat dan daerah, sehingga anggaran yang disediakan untuk pembangunan sektor koperasi dan UMKM dapat dipergunakan secara optimal dan tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 disusun berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021 dan membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra, dan target kinerja yang dicapai oleh Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat, dengan arahan Kepala Daerah terkait dengan program prioritas/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan.

Setelah melalui tahapan pembahasan Renja 2018 bersama TAPD, tahapan. Hasil analisis terhadap rancangan awal kegiatan tersebut hingga menjadi renja yang siap untuk difinalisasikan dalam RKPD tersaji pada **Tabel T.VI.C.7** berikut.

## **2.5. Review Usulan Kabupaten/Kota**

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana kerja OPD adalah usulan kabupaten/kota yang disampaikan dalam Rapat Sinkronisasi SKPD terkait, Forum OPD dan Forum Musrenbang Provinsi. Untuk itu Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat telah mengakomodir usulan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota yang disepakati bersama dalam forum OPD sesuai dengan target kinerja Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dalam draft RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 serta mempertimbangkan anggaran yang telah dianggarkan untuk tahun 2018.

## **2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaringan aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahunan yang sedang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat. Usulan program dan kegiatan ini berasal dari usulan masyarakat yang mengusulkannya melalui Musrenbang yang dilaksanakan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat kabupaten/kota sampai tingkat provinsi, atau berdasarkan proposal program/kegiatan yang masuk ke Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat.

Usulan program/kegiatan tersebut diinventarisasi dan dinilai antara kesesuaiannya berdasarkan nomenklatur baku yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan informasi usulan program/kegiatan yaitu jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi dan besaran volume kegiatan. Hasil inventarisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang memiliki kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat selanjutnya akan dipilah lagi berdasarkan prioritas, fokus kebijakan tahun 2018, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ingin dicapai, dan implikasi terhadap capaian Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat maupun terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Berpedoman Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/4627/ST tanggal 18 Agustus 2015 yang menyebutkan adanya ketentuan bahwa yang menerima hibah harus berbadan hukum, maka apabila ada usulan kegiatan dari masyarakat atau instansi terkait lainnya yang berkaitan dengan bantuan sarana, parasana dan modal, maka Dinas Koperasi,UKM Provinsi Sumatera Barat belum bisa memenuhinya.

Untuk rencana kegiatan tahun 2017 belum ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat atau instansi terkait lainnya. Berdasarkan hal ini, maka pengisian **Tabel T. VI. C. 9** masih kosong.

TABEL T.VI.C.9							
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2017							
PROVINSI SUMATERA BARAT							
DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI SUMATERA BARAT							
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA	CATATAN
		N	I	H	I	L	

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025, peningkatan daya saing UMKM dan koperasi perlu diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Upaya peningkatan daya saing UMKM yang berkaitan dengan misi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui perbaikan produktivitas dan nilai tambah produk khususnya bagi usaha mikro yang sebagian besar mencakup masyarakat berpendapatan rendah. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, serta perkembangan usahanya secara berkelanjutan.

Di sisi lain, peningkatan daya saing UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui fasilitasi bagi UMKM untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional. Fasilitasi tersebut dapat mencakup peningkatan inovasi, penerapan standardisasi dan sertifikasi kualitas proses produksi dan produk, dan peningkatan jangkauan pasar, termasuk ekspor. UMKM juga dapat diperkuat perannya di pasar domestik melalui penurunan biaya transaksi dan promosi penggunaan produk dalam negeri.

Khusus untuk peningkatan daya saing koperasi, upaya-upaya yang perlu dilakukan yaitu mendorong koperasi menjadi lebih mandiri melalui peningkatan dan penguatan partisipasi anggota koperasi untuk mengembangkan usaha bersama. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan peran koperasi sebagai wadah bagi penciptaan efisiensi usaha, peningkatan posisi tawar, dan peningkatan jangkauan pemasaran bagi produk-produk yang dihasilkan oleh anggotanya. Dampak yang diharapkan yaitu peningkatan kesejahteraan anggota koperasi baik secara ekonomi maupun sosial yang selanjutnya akan berkontribusi pada pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan. Selain itu, perbaikan kinerja usaha anggota koperasi juga diharapkan dapat mendorong kemandirian koperasi yang berlanjut pada peningkatan daya saing koperasi.

Selain peningkatan partisipasi anggota, koperasi juga perlu diperkuat kelembagaannya. Hal ini dapat dilakukan melalui modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi sehingga dapat merespon perubahan pasar dengan cepat. Koperasi juga dapat diperkuat manajemennya untuk menjadi pengelola sentra dan organisasi klaster. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi juga perlu diperkuat melalui perluasan keterlibatan UMKM dan koperasi dalam jaringan produksi dan pemasaran, baik regional, nasional maupun internasional.

Perbaikan tata kelola dan kinerja kelembagaan UMKM dan koperasi menjadi faktor penentu dalam pemanfaatan peluang pengembangan kemitraan, termasuk yang berbasis inovasi, investasi dan ekspor. Penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi juga diharapkan dapat berdampak pada perbaikan struktur pelaku usaha di Indonesia, terutama untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini penting untuk mengoptimalkan pengembangan bidang-bidang usaha tertentu yang akan lebih efisien untuk dijalankan dalam skala kecil dan menengah. UKM juga memiliki kapasitas yang lebih baik dibandingkan dengan usaha mikro terutama dalam merespon peluang investasi, kemitraan atau kerja sama usaha, dan perbaikan peraturan, serta perubahan pasar yang dinamis.

Penguatan UKM juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya tenaga kerja yang ada secara optimal. Dalam hal ini, UKM dapat menjadi avalis atau off-taker bagi usaha mikro yang mendominasi populasi pelaku usaha di sektor-sektor primer, serta memfasilitasi pengolahan produk primer menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Peningkatan kapasitas UKM juga diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dunia usaha dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi, yang ditandai dengan keterbukaan dan peningkatan persaingan pasar. Berbagai upaya penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang berfokus pada

pencapaian daya saing kompetitif berdasarkan kemampuan sumber daya alam, SDM dan Iptek.

Kerangka kebijakan yang digunakan dapat dirangkum dalam suatu skenario peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dalam lima tahun ke depan seperti diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Kebijakan pemberdayaan UMKM diarahkan untuk meningkatkan skala UMKM dalam rangka penguatan pasar domestik dan pengembangan keunggulan global. Kebijakan difokuskan pada upaya-upaya:
  - a. peningkatan produktivitas UMKM terutama berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya, serta penyediaan insentif fiskal dan non fiskal;
  - b. peningkatan inovasi dan penerapan standarisasi proses produksi dan produk/jasa UMKM;
  - c. peningkatan kapasitas kelembagaan usaha melalui penguatan kemitraan berbasis rantai nilai dan rantai pasok; dan
  - d. peningkatan jangkauan pemasaran produk dan jasa UMKM;
2. Kebijakan pemberdayaan koperasi diarahkan untuk meningkatkan tata kelola usaha koperasi yang difokuskan pada upaya-upaya:
  - a. peningkatan dan penguatan kontribusi anggota dalam memajukan usaha koperasi sehingga terbangun kemandirian koperasi; dan
  - b. modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi dalam rangka memperkuat kapasitas koperasi untuk berperan secara optimal dalam pasar domestik dan internasional.

Skenario kebijakan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi ke depan juga disusun berdasarkan potensi yang dimiliki oleh UMKM dan koperasi. Potensi terbesar UMKM saat ini yaitu populasinya yang besar, serta karakteristik organisasi dan usahanya yang fleksibel. Populasi UMKM yang besar merupakan modal untuk berkontribusi pada pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan skala produksi dan pemasaran. Fleksibilitas organisasi, tata kerja dan pengelolaan usaha UMKM juga memberi kemudahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Kapasitas Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019,

UMKM umumnya dibangun dari sumber daya lokal (bahan baku, pengetahuan, keterampilan, dan tenaga kerja) juga menjadikan usahanya dapat menghasilkan produk yang terjangkau bagi masyarakat. Potensi tersebut menjadikan UMKM dapat berkontribusi besar dalam penguatan pasar domestik, khususnya dalam penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Sementara itu sebagai organisasi yang berbasis anggota, koperasi dapat menggunakan kekuatan partisipasi anggotanya untuk membangun kemandirian dan kemajuan usaha. Koperasi juga dapat mengembangkan skala yang memadai untuk UMKM yang bergabung menjadi anggotanya. Cara ini akan memungkinkan koperasi untuk meningkatkan efisiensi usaha bersama mulai dari pengadaan, produksi sampai pemasaran. Dengan misi ekonomi dan sosialnya, koperasi juga dapat berkontribusi pada peningkatan modal sosial masyarakat serta kesempatan kerja bagi masyarakat.

Pengembangan UMKM dan koperasi juga didukung ketersediaan payung hukum, sumber daya alam dan SDM. Struktur peraturan yang ada sudah memberikan koridor yang jelas mengenai penyediaan dukungan bagi perkembangan UMKM dan koperasi ke depan. Ketersediaan sumber daya alam dan skala permintaan yang besar (populasi penduduk yang besar) juga menjadi faktor eksternal pendukung bagi perkembangan UMKM. Adanya budaya gotong-royong juga menjadi cikal bakal bagi perkembangan koperasi. Potensi UMKM dan koperasi juga dapat dilihat dari adanya dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, terkait pengembangan usaha baru dan penguatan UMKM dan koperasi di berbagai sektor dan wilayah.

Namun efektivitas penggunaan berbagai potensi dan sumber daya tersebut masih membutuhkan penanganan berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dan koperasi. beberapa permasalahan umum yang perlu dicermati adalah sebagai berikut:

1. Struktur pelaku usaha nasional masih didominasi oleh usaha mikro yang informal dan memiliki akses ke sumber daya, kapasitas SDM, serta kontribusi yang terbatas;

2. Penurunan kontribusi UMKM dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) di sektor-sektor dengan jumlah UMKM yang besar yaitu sektor pertanian dan perdagangan. Kondisi ini juga menunjukkan kontribusi UMKM dalam meningkatkan nilai tambah di sektor-sektor produktif masih rendah;
3. Populasi dan kontribusi PDB usaha kecil dan menengah yang rendah mengkonfirmasi masalah missing middle dalam struktur pelaku usaha;
4. Kesenjangan yang melebar antara produktivitas per unit UMKM dan usaha besar, dan antar UMKM di berbagai sektor;
5. Partisipasi UMKM dalam ekspor masih rendah dan kontribusinya dalam ekspor terus mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir;
6. Kontribusi UMKM dalam investasi masih lebih rendah dibandingkan dengan usaha besar; dan
7. Koperasi belum berperan optimal dalam peningkatan efisiensi dan posisi tawar anggotanya.

Ketujuh permasalahan tersebut perlu ditangani secara komprehensif dengan memperhatikan masalah-masalah spesifik terkait SDM, produksi dan pemasaran, pembiayaan, kelembagaan dan iklim usaha.

## **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

### **3.2.1. Tujuan**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Koperasi dan UMKM seperti yang dikemukakan diatas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi

2. Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah
3. Terwujudnya Dinas Koperasi, UMKM yang berkinerja baik

### **3.2.2. Sasaran**

Tujuan yang akan diwujudkan tersebut selanjutnya dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat ini menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi koperasi dan UMKM yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut.

Selanjutnya bagian berikut akan menjelaskan dan merinci masing-masing tujuan yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang (2016-2021) beserta sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya koperasi berkualitas
2. Meningkatnya daya saing dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah
3. Meningkatnya Kapasitas organisasi Dinas Koperasi, UMKM

### **3.3.3. Program dan Kegiatan tahun 2019**

Mengacu kepada kebijakan Pemerintah Pusat dalam menjalankan pembangunan koperasi, industri dan perdagangan didaerah serta berpedoman pada kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan mempertimbangkan pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam pencapaian MDGs, pengentasan kemiskinan dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah, maka untuk tahun 2018 Dinas Koperasi, usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah program dan Kegiatan :
  - a. Belanja Langsung Pokok 6 program 28 kegiatan
  - b. Belanja Langsung Urusan Koperasi, 3 program dan 58 kegiatan

2. Total Kebutuhan dana untuk Tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 17.849.520.000,-

**TABEL T.VI.C.10**  
**Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017**  
**dan Perkiraan Maju Tahun 2018**  
**Provinsi Sumatera Barat**

**DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kode Rekening	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2017				RENCANA TAHUN 2018		
			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA,	SUMBER	CATATAN	TARGET	KEBUTUHAN DANA,
				CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	DANA		CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>BELANJA LANGSUNG POKOK</b>				<b>5.747.432.950</b>				<b>5.449.900.000</b>
<b>1.15.1.15.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>			<b>2.495.138.450</b>				<b>2.348.000.000</b>
1.15.1.15.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Padang	12 bulan	40.000.000	APBD		12 bulan	45.000.000
1.15.1.15.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan listrik	Padang	12 bln, 2 kntr	275.000.000	APBD		12 bln, 2 kntr	285.000.000
1.15.1.15.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	Padang	12 bln, 2 kntr	229.000.000	APBD		12 bln, 2 kntr	235.000.000
1.15.1.15.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Padang	12 bulan	74.952.375	APBD		12 bulan	80.000.000
1.15.1.15.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan adm perkantoran	Padang	12 bulan	74.754.200	APBD		12 bulan	80.000.000
1.15.1.15.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Tersedianya komponen instalasi listrik	Padang	12 bulan	35.000.523	APBD		12 bulan	40.000.000
1.15.1.15.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Padang	AC 44 unit, genset 1 unit, kulkas 2 unit, rak piring 1 unit	782.290.000	APBD		AC 30 unit, genset 1 unit, kulkas 1 unit, rak piring 1 unit	550.000.000
1.15.1.15.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Padang	12 bulan	20.000.000	APBD		12 bulan	20.000.000
1.15.1.15.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minuman	Padang	12 bulan	60.000.000	APBD		12 bulan	60.000.000
1.15.1.15.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi	Sumbar dan Luar Sumbar	12 bulan	503.373.600	APBD		12 bulan	550.000.000

## RENJA 2018

1.15.1.15.01.01.22	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Tersedianya Jasa Sopir Kantor	Padang	12 bulan	90.000.000	APBD		12 bulan	95.000.000
1.15.1.15.01.01.24	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	Tersedianya Jasa Pengaman Kantor	Padang	12 bulan	239.667.752	APBD		12 bulan	250.500.000
1.15.1.15.01.01.25	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Tersedianya jasa informasi, dok. Dan publikasi	Padang	12 bulan	50.000.000	APBD		12 bulan	55.000.000
1.15.1.15.01.01.26	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Tersedianya mental dan fisik aparatur	Padang	12 bulan	21.100.000	APBD		12 bulan	22.500.000
<b>1.15.1.15.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>2.461.412.000</b>				<b>2.279.900.000</b>
1.15.1.15.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan operasional kantor	Padang	1 unit mobil operasional	375.000.000	APBD		1 unit	425.000.000
1.15.1.15.01.02.10	Pengadaan Meubelir	Tersedianya meubelir Kantor	Padang	Meja , kursi, lemari arsip	1.195.450.000	APBD		Meja , kursi, lemari arsip	850.000.000
1.15.1.15.01.02.15	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Padang	Komputer 10 unit, UPS 10 unit, Laptop 4 unit	195.000.000	APBD		Komputer 5 unit, UPS 5 unit, Laptop 3 unit	270.000.000
1.15.1.15.01.02.16	Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	Tersedianya Alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	Padang	9 unit	181.550.000	APBD		9 unit	185.000.000
1.15.1.15.01.02.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat komunikasi, Alat informasi	Terpeliharanya alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	Padang	6 unit	20.000.000	APBD		6 unit	15.000.000
1.15.1.15.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung	Padang	2 Gedung	190.000.000	APBD		1 Gedung	199.900.000
1.15.1.15.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional	Padang	mobil 3 unit, motor 10 unit	100.000.000	APBD		mobil 3 unit, motor 10 unit	110.000.000
1.15.1.15.01.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya perlatan dan perlengkapan	Padang	56 unit	20.000.000	APBD		56 unit	20.000.000
1.15.1.15.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur	Terpeliharanya meubeler	Padang	107 bh	16.000.000	APBD		107 bh	20.000.000
1.15.1.15.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terpeliharanya Komputer dan jaringan	Padang	67 kl	30.000.000	APBD		67 kl	35.000.000
1.15.1.15.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Terpeliharanya instalasi dan jaringan	Padang	2 gedung	50.000.000	APBD		2 gedung	60.000.000
1.15.1.15.01.02.29	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terkelolanya aset SKPD	Padang	12 bln	88.412.000	APBD		12 bln	90.000.000
<b>1.15.1.15.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Meningkatnya disiplin aparatur</b>			<b>57.960.000</b>				<b>55.000.000</b>
1.15.1.15.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya bagi aparatur	Padang	80 stel	57.960.000	APBD		84 stel	55.000.000

## RENJA 2018

1.15.1.15.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur</b>			<b>104.472.000</b>				<b>110.000.000</b>
1.15.1.15.01.05.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya jumlah aparat yang mengikuti Bintek perundang-undangan	Sumbang dan Luar Sumbang	12 org	104.472.000	APBD		12 org	110.000.000
1.15.1.15.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan</b>			<b>628.450.500</b>				<b>637.000.000</b>
1.15.1.15.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD (Lakip,LKPJ, LPPD,EKPD)	Padang	6 jenis laporan	67.282.500	APBD		6 jenis laporan	70.000.000
1.15.1.15.01.06.03	Penyusunan Perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya perencanaan dan anggaran SKPD	Padang	6 dokumen	102.000.000	APBD		6 dokumen	107.000.000
1.15.1.15.01.06.04	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	Tersusunnya laporan Monev program urusan KUMKM	Sumbang dan Luar Sumbang	2 Lap	100.000.000	APBD		2 Lap	100.000.000
1.15.1.15.01.06.05	Penatausahaan Keuangan SKPD	Tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran	Padang	12 bln	300.434.000	APBD		12 bln	300.000.000
1.15.1.15.01.06.07	Pengembangan dan Peningkatan Data dan Informasi	Tersusunnya data dan informasi	Padang	1 buku data base	58.734.000	APBD		1 buku data base	60.000.000
	<b>BELANJA LANGSUNG URUSAN</b>				<b>7.405.629.050</b>				<b>8.880.000.000</b>
1.15.1.15.01.27	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING KOPERASI</b>	<b>Meningkatnya daya saing koperasi</b>			<b>5.245.033.050</b>				<b>5.640.000.000</b>
1.15.1.15.01.27.01	Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award	Terlaksananya Penilaian Koperasi Berprestasi	19 kab/kota	25 Kop	200.000.000	APBD		25 Kop	250.000.000
1.15.1.15.01.27.02	Pembenahan Koperasi Tidak Aktif	Terbenahnya koperasi tidak aktif melalui Bimtek	Provinsi dan 10 kab/kota	300 Kop, 10 Kab./Kota	110.000.050	APBD		250 org, 10 kab/kota	120.000.000
1.15.1.15.01.27.03	Pemasyarakatan Perkoperasian bagi Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Terlaksananya penyuluha perkoperasian dan sosialisasi perundang-undangan	Sumbang	475 org, 210 org	274.064.000	APBD		750 org	280.000.000
1.15.1.15.01.27.05	Revitalisasi Kelembagaan Koperasi	Terlaksananya revitalisasi kelembagaan koperasi	Provinsi dan 8 kab/kota	8 Kab./Kota	242.997.200	APBD		10 kab/kota, 570 org	250.000.000
1.15.1.15.01.27.07	Pembubaran Koperasi Primer dan Sekunder Propinsi yang tidak aktif	Terlaksananya sosialisasi dan pembubaran Koperasi primer dan sekunder propinsi yang tidak Aktif	Provinsi	10 Kop di 5 Kab./Kota	95.000.100	APBD		10 kop	110.000.000
1.15.1.15.01.27.08	Penilaian dan Usulan Tanda Penghargaan bagi Tokoh Koperasi	Terlaksananya penilaian bagi tokoh koperasi yang akan mendapat penghargaan	Provinsi dan 19 kab/kota	7 org tokoh	278.820.750	APBD		7 org	290.000.000

## RENJA 2018

1.15.1.15.01.27.09	Sosialisasi Perkoperasian dilokasi TMMD/N	Terlaksananya sosialisasi perkoperasian di lokasi TMMD/N	3 Kab/Kota	3 kab/kota	50.605.400	APBD		3 kab/kota	55.000.000
1.15.1.15.01.27.10	Sosialisasi dan Peningkatan peran Koperasi dalam pengembangan kelompok usaha Strategis	Terlaksananya Sosialisasi dan Peningkatan peran Koperasi dalam pengembangan kelompok usaha Strategis	19 Kab/Kota	1075 org	302.224.500	APBD		375 org	310.000.000
1.15.1.15.01.27.17	Pelatihan Bisnis Plant bagi Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Bisnis Plant bagi Koperasi	Padang	100 org, 2 akt	248.966.000	APBD		100 org, 2 akt	260.000.000
1.15.1.15.01.27.18	Pelatihan Managemen usaha bagi UMK Kawasan Wisata	Terlaksananya Pelatihan Managemen usaha bagi UMK Kawasan Wisata	Padang	100 org, 2 akt	280.621.000	APBD		100 org, 2 akt	290.000.000
1.15.1.15.01.27.20	Pelatihan Akuntansi bagi pengurus dan Pengelola Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Akuntansi bagi pengurus dan Pengelola Koperasi	Padang	100 org, 2 akt	260.509.000	APBD		200 org, 4 akt	275.000.000
1.15.1.15.01.27.21	Pelatihan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM	Padang	100 org, 2 akt	248.966.000	APBD		200 org, 4 akt	325.000.000
1.15.1.15.01.27.22	Pembinaan Peningkatan Daya saing Koperasi/KUD Sektor Pertanian	Terlaksananya bimbingan teknis Peningkatan Daya saing Koperasi Sektor Pertanian/Perikanan	19 Kab/kota, Provinsi	60 org, 19 kab/kota	283.335.300	APBD		60 org, 19 kab/kota	300.000.000
1.15.1.15.01.27.24	Revitalisasi Usaha Koperasi Pertanian/KUD	Terlaksananya rapat revitalisasi usaha koperasi	19 Kab/Kota Provinsi, Luar Provinsi	2 kl 100 org, 18 kab/kota	204.044.050	APBD		2 kl 100 org, 18 kab/kota	210.000.000
1.15.1.15.01.27.25	Peningkatan usaha ritail koperasi	Terlaksananya bimbingan teknis	19 Kab/Kota Provinsi, Luar Provinsi	1 kl 60 org, 19 kab/kota	263.303.750	APBD		1 kl 60 org, 19 kab/kota	275.000.000
1.15.1.15.01.27.26	Koordinasi Pembinaan Usaha Koperasi Pengelola Pasar (Koppas) dan Pengelola Pasar Rakyat	Terlaksananya koordinasi Pembinaan usaha Koperasi Pasar dan pengelola pasar	Kab/Kota Provinsi, Luar Provinsi	2 kl 120 org, 16 kab/kota	163.204.800	APBD		2 kl 120 org, 16 kab/kota	170.000.000
1.15.1.15.01.27.27	Peningkatan Peran Koperasi Sektor Aneka Usaha	Terlaksananya Peningkatan Peran Koperasi Sektor Aneka Usaha	19 Kab/Kota Provinsi, Luar Provinsi	2 kl 100 org, 18 kab/kota	143.834.800	APBD		2 kl 100 org, 18 kab/kota	150.000.000
1.15.1.15.01.27.28	Pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan Pendekatan One Village One Product (OVOP) melalui Koperasi	Terlaksananya Pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan pendekatan OVOP	19 Kab/Kota Provinsi, Luar Provinsi	18 kop/ pra kop	283.039.350	APBD		18 kop/ pra kop	300.000.000
1.15.1.15.01.27.29	Pengembangan Usaha Koperasi melalui Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)	Terlaksananya pengembangan usaha koperasi melalui GEMASKOP	Provinsi, Luar Provinsi	1 kali, 3 kop	157.334.000	APBD		1 kali, 3 kop	160.000.000
1.15.1.15.01.27.32	Peningkatan usaha koprasasi sektor perikanan	Terlaksananya peningkatan usaha koprasasi sektor perikanan	7 kab/kota	Bimtek 3 wil 150 org	199.464.000	APBD		Bimtek 3 wil 150 org	210.000.000
				Bantuan sarana waserda perikanan		APBD		Bantuan sarana waserda perikanan	

## RENJA 2018

1.15.1.15.01.27.33	Peningkatan dan evaluasi Permodalan Koperasi	Terlaksananya peningkatan dan evaluasi permodalan Koperasi yang mengelola Simpan Pinjam	Provinsi, Luar Provinsi	15 kop	133.675.000	APBD		15 kop	140.000.000
1.15.1.15.01.27.34	Peningkatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi pola Syariah	Terlaksananya Peningkatan Peran usaha Simpan Pinjam Koperasi pola Syariah	Provinsi, Luar Provinsi	15 kop	186.325.600	APBD		15 kop	200.000.000
1.15.1.15.01.27.36	Pembinaan Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Teraksananya Pembinaan Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Provinsi	50 Kop	261.272.150	APBD		50 Kop	270.000.000
1.15.1.15.01.27.37	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Usaha simpan pinjam koperasi	Provinsi	50 Kop	259.823.250	APBD		50 Kop	265.000.000
1.15.1.15.01.27.38	Pembinaan Pelaksanaan Kesehatan Usaha Simpan Pinjam koperasi	Terlaksananya pembinaan kesehatan Usaha simpan pinjam koperasi	Provinsi	Pembina dan 38 kop	113.603.000	APBD		Pembina dan 38 kop	175.000.000
<b>1.15.1.15.01.28</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING UMKM</b>	<b>Meningkatnya daya saing UMKM</b>			<b>2.160.596.000</b>				<b>3.240.000.000</b>
1.15.1.15.01.28.01	Sosialisasi dan Koordinasi Pendaftaran Merek dan Sertifikat Halal	1. Terlaksananya Sosialisasi Merek Dan Halal Produk UMKM	19 Kab/Kota, Provinsi, Luar Provinsi	80 UMKM	146.000.000	APBD		150 UMKM	300.000.000
1.15.1.15.01.28.05	Partisipasi Promosi Produk UMKM	Terlaksananya Promosi UMKM Pengrajin Sumatera Barat	Jakarta,Jogya,Bandung,Makassar,Kalbar.	5 ivent	360.000.000	APBD		14 ivent, 28 UMKM	650.000.000
1.15.1.15.01.28.06	Temu Mitra UMKM Pengrajin dengan UMKM pengrajin diluar Sumatera Barat	Terlaksananya Temu Mitra UMKM	Provinsi dan Sumatera Selatan	35 UMKM	140.000.000	APBD		40 UMKM	260.000.000
1.15.1.15.01.28.07	Penyusunan Profil UMKM Makanan dan Minuman unggulan Sumatera Barat	Tersedianya buku data base UMKM unggulan produk makanan dan minuman unggulan Sumatera Barat	Sumbar	100 UMKM	50.000.000	APBD		100 UMKM	60.000.000
1.15.1.15.01.28.08	Perkuatan produk UMKM	Terlaksananya peningkatan nilai produk UMKM melalui keamanan pangan, peningkatan daya saing dan inovasi produk	10 wilayah dan luar Sumbar	1 kl 10 wilayah	146.500.000	APBD		1 kl 10 lokasi sentra	165.000.000
1.15.1.15.01.28.09	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan di lokasi Sentra	Terlaksananya peningkatan kelembagaan usaha UMK sentra	9 Lokasi Sentra	2 kl 9 lokasi sentra	150.000.000	APBD		2 kl 5 lokasi sentra	155.000.000
1.15.1.15.01.28.10	Pengembangan UMKM kerajinan unggulan Sumatera Barat	Terlaksananya Pengembangan UMKM kerajinan Sumatera Barat	Sumbar dan Luar Sumbar	150 UMKM	700.000.000	APBD		150 UMKM	750.000.000
1.15.1.15.01.28.11	Peningkatan akses pembiayaan UMKM ke Perbankan dan Lembaga Non Bank	Terlaksananya Peningkatan akses pembiayaan UMKM ke Perbankan dan Lembaga Non Bank	Sumbar	10 KK	168.096.000	APBD		19 KK	250.000.000
1.15.1.15.01.28.14	Peningkatan Gerakan Terpadu Pensejahteraan UMKM Sumatera Barat	Terlaksananya Peningkatan Gerakan Terpadu Pensejahteraan UMKM Sumatera Barat	Sumbar Luar Sumbar	4 UMK	300.000.000	APBD		4 UMK	650.000.000
<b>TOTAL</b>						<b>13.153.062.000</b>			<b>14.329.900.000</b>

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rancangan Renstra 2016-2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Propinsi Sumatera Barat serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Tahun 2018. Sebagai turunan Renstra, Renja ini secara khusus menerjemahkan dan menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan pembangunan jangka pendek di bidang koperasi dan UMKM.

Dalam penyusunan Renja, Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis terkait pengembangan koperasi dan UMKM, ditingkat nasional maupun Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, Renja ini sedapat mungkin mengupayakan sinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan nasional yang diambil oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. Masukan dari berbagai pemangku kepentingan (, kabupaten/kota, lembaga keuangan dan lain-lain) dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2018 juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja ini.

Nilai anggaran yang tercantum dalam Renja ini masih bersifat indikatif. Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, UMKM Tahun Anggaran 2018 selain mengacu pada Renja ini juga menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.



